KEMNAKER

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2021



PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2022

KEMNAKER

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN



SAMBUTAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Krisis ekonomi pasca pandemi *Covid-19* memberi dampak yang signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dirilis oleh BPS pada kondisi bulan Agustus 2022 sebesar 5,86 % artinya TPT tersebut berada pada rentang target sasaran pembangunan pada RKP tahun 2022 sebesar 5,5 – 6,3 %. Bila dibandingkan dengan kondisi TPT pada bulan Agustus 2021 maka TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 %. Kondisi ini tentunya merupakan keberhasilan dari semua pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi bersama dalam berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Kondisi ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) isu strategis yaitu Bonus Demografi, Revolusi Industri 4.0, pandemi Covid 19, perang rusia dan ukraina. Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus Demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dimana 64 % penduduk Indonesia berada pada usia produktif sehingga perlu dilakukan upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan baik dari dunia kerja maupun dunia industri. Selain itu dalam rangka menghadapi era Industrialisasi 4.0 maka diperlukan kolaborasi bersama untuk melakukan re-skilling terhadap tenaga kerja yang terdampak revolusi industri 4.0 serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi era digitalisasi. Dalam rangka menghadapi era digitalisasi tersebut maka perlu dilengkapi dengan sarana dan infrastruktur serta SDM yang kompeten sehingga kolaborasi dari semua stakeholder sangat diperlukan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey bahwa di Indonesia akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang akan terdampak dan tergantikan oleh otomatisasi namun di sisi lain juga akan muncul 46 juta pekerjaan baru. Tantangan ini akan menyebabkan perubahan-perubahan baru dan akan muncul jabatan-jabatan baru di pasar kerja yang akan membuka peluang kesempatan kerja. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 maka teknologi informasi, kecepatan, inovasi dan kompetensi kerja merupakan keniscayaan yang wajib dikuasai angkatan kerja. Bahkan, jika tenaga kerja melek teknologi, ekonomi diprediksi dapat tumbuh hingga 7%. Namun berdasarkan laporan

KEMNAKER

yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia sebesar 77.03 % atau sebanyak 210 Juta Jiwa penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebagai pendukung kerja (Data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia- APJII) periode 2021-2022), sehingga Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang sudah mencapai angka 84%.

Seiring dengan target rencana pembangunan nasional pada pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Ketenagakerjaan membuat resolusi kinerja dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang makin kondusif melalui Sembilan Lompatan Kemnaker yaitu Transformasi BLK, *Link and Match* Ketenagakerjaan, Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, Ekosistem Digital SIAPKerja, dan Reformasi Birokrasi.

Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan tersebut menjadi inovasi besar yang harus segera dilakukan dalam menghadapi bonus demografi di era digitalisasi pasca pandemic *Covid-19*. Kami mengharapkan seluruh stakeholder terkait untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan merujuk pada hasil pengukuran pembangunan ketenagakerjaan, dimana indikator pengukuran yang digunakan sudah berdasar pada tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan mengacu pada konsep pembangunan dunia yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Tim Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan yang telah menyusun buku Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021. Semoga buku ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Plt. Kepala
Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan,

Ir. Ismail Pakaya, M.E.

KEMNAKER

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mengukur capaian kinerja pembangunan ketenagakerjaan maka Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan melakukan pengukuran melalui Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mengacu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Pengukuran Indeks telah terintegrasi dengan konsep pembangunan dunia yang berkelanjutan secara khusus pada tujuan ke 8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan kerja layak dengan 9 (sembilan) indikator yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Untuk pengukuran yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini data yang digunakan adalah data tahun 2021 yang melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengumpulan data, validasi data, pengolahan data dan penetapan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Tahapan pengumpulan hingga pengolahan data dilakukan oleh Tim Pengukur Pembangunan Ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut maka untuk pengukuran Indeks dibagi atas 3 (tiga) tipologi yaitu urusan ketenagakerjaan skala besar, urusan ketenagakerjaan skala sedang dan urusan ketenagakerjaan skala kecil.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan maka berdasarkan urusan ketenagakerjaan skala besar, sedang, dan kecil, secara berurutan Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara merupakan daerah yang mendapatkan peringkat terbaik dengan nilai masing-masing, 64,20 ; 72,83 ; dan 71,44. Sedangkan untuk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 ini merupakan daerah yang berhak mendapat penghargaan yang didasarkan pada

KEMNAKER

kategori akselerasi, sementara beberapa daerah lainnya yang mengalami kenaikan nilai indeks antara lain Kalimantan Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat.

Akan tetapi beberapa daerah mengalami penurunan nilai indeks seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Jika pada tahun 2020 interval angka indeks dari yang tertinggi hingga terendah sebesar 36,61 maka pada tahun 2021 ini terdapat interval sebesar 36,53. Ini menunjukkan bahwa nilai persebaran indeks pembangunan ketenagakerjaan tahun 2021 sedikit lebih merata dibanding tahun 2020. Nilai tertinggi tahun lalu diperoleh DKI Jakarta, dan terendah diperoleh Nusa Tenggara Timur, dan tahun 2021 nilai tertinggi tetap diperoleh DKI Jakarta, dan terendah jatuh pada provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu perbaikan program-program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah dari sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pada evaluasi. Tak lupa saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, para pakar serta semua pihak yang telah membantu sehingga buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 ini dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya saya berharap buku ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai isu sentral dan tidak lagi menjadi isu pinggiran, karena pembangunan ketenagakerjaan adalah salah satu kunci utama kebehasilan pembangunan nasional.

Jakarta, Desember 2022

Kepala

Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan,

Siti Kustiati, S.E., M.Si

KEMNAKER

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GRAFIK ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
BAB 2 DIMENSI, INDIKATOR UTAMA, DAN SUB INDIKATOR **7**
DIMENSI **8**
INDIKATOR UTAMA **8**
SUB INDIKATOR **9**
BOBOT **12**
KRITERIA **14**
BAB 3 METODE PENGHITUNGAN **17**
DATA DAN SUMBER DATA 17
TAHAPAN PENGHITUNGAN 18
Penghitungan Nilai Aktual Sub Indikator 18
Penghitungan Indeks Sub Indikator 22
Penghitungan Indeks Tiap-Tiap Indikator Utama 22
Penghitungan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Dan Provinsi (Komposit) 22
Penetapan Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 22
BAB 4 HASIL PENGUKURAN **25**
NASIONAL 25
PROVINSI 31
Provinsi Aceh 32
Provinsi Sumatera Utara 34
Provinsi Sumatera Barat 36
Provinsi Riau 38
Provinsi Jambi 40
Provinsi Sumatera Selatan 42
Provinsi Bengkulu 44
Provinsi Lampung 46

KEMNAKER

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 48
Provinsi Kepulauan Riau 50
Provinsi DKI Jakarta 52
Provinsi Jawa Barat 54
Provinsi Jawa Tengah 56
Provinsi DI Yogyakarta 58
Provinsi Jawa Timur 60
Provinsi Banten 62
Provinsi Bali 64
Provinsi Nusa Tenggara Barat 66
Provinsi Nusa Tenggara Timur 68
Provinsi Kalimantan Barat 70
Provinsi Kalimantan Tengah 72
Provinsi Kalimantan Selatan..... 74
Provinsi Kalimantan Timur 76
Provinsi Kalimantan Utara 78
Provinsi Sulawesi Utara 80
Provinsi Sulawesi Tengah 82
Provinsi Sulawesi Selatan 84
Provinsi Sulawesi Tenggara 86
Provinsi Gorontalo 88
Provinsi Sulawesi Barat 89
Provinsi Maluku 92
Provinsi Maluku Utara 94
Provinsi Papua Barat 96
Provinsi Papua 98
BAB 5 PENUTUP 101
TIM PENGUKUR 102
TIM PENYUSUN 105

KEMNAKER

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Integrasi Indikator dalam SDGs dengan Sub Indikator dalam IPK	2
Tabel 2	Daftar Bobot Indikator Utama dan Bobot Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	13
Tabel 3	Daftar Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Sub Indikator dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	14
Tabel 4	Tingkatan Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	22
Tabel 5	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2020-2021	26
Tabel 6	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2021	27
Tabel 7	Provinsi Dengan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Tahun 2021	28
Tabel 8	Provinsi dengan IPK Terbaik Berdasarkan Tipologi Urusan Ketenagakerjaan	30
Tabel 9	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2020-2021	33
Tabel 10	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021	35
Tabel 11	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021	37
Tabel 12	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2020-2021	39
Tabel 13	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2020-2021	41
Tabel 14	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021	43
Tabel 15	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	45
Tabel 16	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2020-2021	47
Tabel 17	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021	49
Tabel 18	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021	51
Tabel 19	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021	53

KEMNAKER

Tabel 20 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021 55
Tabel 21 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021 57
Tabel 22 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2021 59
Tabel 23 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021 61
Tabel 24 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2020-2021 63
Tabel 25 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2020-2021 65
Tabel 26 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2021 67
Tabel 27 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2021 69
Tabel 28 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021 71
Tabel 29 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 73
Tabel 30 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021 75
Tabel 31 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021 77
Tabel 32 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2021 79
Tabel 33 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2021 81
Tabel 34 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021 83
Tabel 35 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021 85
Tabel 36 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021 87
Tabel 37 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 89

KEMNAKER

Tabel 38 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021 91
Tabel 39 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2020-2021 93
Tabel 40 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021 95
Tabel 41 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2021 97
Tabel 42 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2020-2021 99

KEMNAKER

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Sistematika Dimensi, Indikator Utama dan Sub Indikator Dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	8
Grafik 2	Perbandingan Nilai Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2020-2021	26
Grafik 3	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021	32
Grafik 4	Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2021	32
Grafik 5	Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2021	32
Grafik 6	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021	34
Grafik 7	Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	34
Grafik 8	Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	34
Grafik 9	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021	36
Grafik 10	Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	36
Grafik 11	Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	36
Grafik 12	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2021	38
Grafik 13	Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2021	38
Grafik 14	Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2021	38
Grafik 15	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021	40
Grafik 16	Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2021	40

KEMNAKER

Grafik 17 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2021 40
Grafik 18 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2021 42
Grafik 19 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 42
Grafik 20 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 42
Grafik 21 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2021 44
Grafik 22 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 44
Grafik 23 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 44
Grafik 24 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021 46
Grafik 25 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2021 46
Grafik 26 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2021 46
Grafik 27 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021 48
Grafik 28 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 48
Grafik 29 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 48
Grafik 30 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021 50
Grafik 31 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 50
Grafik 32 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 50
Grafik 33 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2021 52
Grafik 34 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 52

KEMNAKER

Grafik 35 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 52
Grafik 36 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021 54
Grafik 37 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 54
Grafik 38 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 54
Grafik 39 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 56
Grafik 40 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 56
Grafik 41 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 56
Grafik 42 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional Tahun 2021 58
Grafik 43 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2021 58
Grafik 44 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2021 58
Grafik 45 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 60
Grafik 46 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 60
Grafik 47 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 60
Grafik 48 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021 62
Grafik 49 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2021 62
Grafik 50 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2021 62
Grafik 51 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2021 64
Grafik 52 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021 64

KEMNAKER

Grafik 53 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021 64
Grafik 54 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2021 66
Grafik 55 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2021 66
Grafik 56 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 66
Grafik 57 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2021 68
Grafik 58 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 68
Grafik 59 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 68
Grafik 60 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021 70
Grafik 61 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 70
Grafik 62 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2021 70
Grafik 63 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021 72
Grafik 64 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 72
Grafik 65 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah Tahun 2021 72
Grafik 66 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 74
Grafik 67 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 74
Grafik 68 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Tahun 2021 74
Grafik 69 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2021 76
Grafik 70 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 76

KEMNAKER

Grafik 71 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Tahun 2021 76
Grafik 72 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021 78
Grafik 73 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimanta Utara Tahun 2021 78
Grafik 74 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Utara Tahun 2021 78
Grafik 75 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2021 80
Grafik 76 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 80
Grafik 77 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Tahun 2021 80
Grafik 78 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2021 82
Grafik 79 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 82
Grafik 80 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Tahun 2021 82
Grafik 81 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 84
Grafik 82 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 84
Grafik 83 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Tahun 2021 84
Grafik 84 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2021 86
Grafik 85 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 86
Grafik 86 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Tahun 2021 86
Grafik 87 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021 88
Grafik 88 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi GorontaloTahun 2021 88

KEMNAKER

Grafik 89 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Gorontalo Tahun 2021 88
Grafik 90 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2021 90
Grafik 91 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi SulawesiBarat Tahun 2021 90
Grafik 92 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Tahun 2021 90
Grafik 93 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2021 92
Grafik 94 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2021 92
Grafik 95 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2021 92
Grafik 96 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2021 94
Grafik 97 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 94
Grafik 98 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 94
Grafik 99 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2021 96
Grafik 100 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 96
Grafik 101 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 96
Grafik 102 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021 98
Grafik 103 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2021 98
Grafik 104 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun2021 98

KEMNAKER



BAB 1
PENDAHULUAN

Revolusi digital telah memaksa dunia usaha melakukan transformasi, yakni transformasi dari pola-pola lama beralih kepada pola-pola baru sebagai respons atas tuntutan perubahan dan persaingan. Penggunaan teknologi semakin meningkat, dan muncul banyak pekerjaan, kompetensi dan keahlian baru yang mendisrupsi sektor ketenagakerjaan. Disrupsi tersebut adalah pertama, resesi perekonomian dan berkurangnya lapangan kerja akibat dari pandemi. Kedua, era otomatisasi yang dating lebih cepat akibat tidak terbendungnya laju digitalisasi di tengah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan.

World Economic Forum (WEF) dalam *The Future of Jobs Report 2020* memperkirakan di dunia akan ada 97 juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang. Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi puluhan juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut.

Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah Revolusi Industri 4.0.

Kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia usaha ke depannya. Selain itu, diperlukan kolaborasi dalam hal pengembangan pelatihan vokasi dalam bentuk *Triple Skilling* yakni *skilling*, *reskilling* dan *upskilling* bagi pekerja, optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada *human digital online*, penggunaan metode *blended training*, serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industry untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pandemi COVID-19 telah berimbas sangat besar baik, dari segi Kesehatan maupun perekonomian nasional. Tidak sedikit perusahaan atau industri yang terkena guncangan ekonomi dan berakibat ada yang bertahan, namun ada juga yang terpuruk, mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan bertambah. Di sisi lain, Pandemi Covid-19 harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk merefleksikan dan mengoptimalkan kebijakan ketenagakerjaan, yang tertuang dalam 4 isu strategis. **Pertama** mengadaptasi perlindungan sosial untuk mencerminkan pola kerja yang berubah. Perlindungan sosial adalah kunci untuk menavigasi multi-transisi masa depan pekerjaan. Kebijakan perlindungan sosial di saat krisis dan kondisi normal, dapat terus diperkuat dengan mendorong dialog sosial untuk menghasilkan skema perlindungan yang terbaik, tepat dan inklusif. **Kedua**, mempersiapkan kaum muda yang lebih baik untuk transisi dunia kerja. Dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih baik dan berkualitas, kita menyadari pentingnya peningkatan keterampilan dan daya saing bagi kaum muda. Hal ini sebagai upaya untuk

membawa kaum muda yang masih berstatus NEET (*not in employment, education and/or training*) ke pasar tenaga kerja, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. **Ketiga**, mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. **Keempat**, mengeksplorasi penerapan wawasan perilaku dalam rangka merumuskan kebijakan pasar tenaga kerja yang kuat. Pasar tenaga kerja saat ini sangat dipengaruhi oleh tren global yang harus diatasi dengan inovasi berbasis bukti untuk membentuk kebijakan yang tepat di tingkat nasional dan internasional. *Behavioral Insight* mengkolaborasikan peran pemerintah, masyarakat dan dukungan teknologi informasi sehingga dapat menjadi salah satu metode alternatif dalam perumusan kebijakan.

Saat ini Indonesia sedang menuju tahapan terakhir dari Visi Pembangunan Indonesia 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ke 4 Tahun 2020-2025 atau yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan pencanangan agenda negara-negara di dunia 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang juga berpusat kepada manusia, atau lebih lengkapnya bertumpu pada: manusia (pembangunan manusia), planet (keberlanjutan lingkungan), kemakmuran (pertumbuhan dan transformasi ekonomi inklusif) dan kemitraan (kerjasama internasional) (Gore 2015 dalam ILO, 2019).

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017. Di sisi lain, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker sejak tahun 2011 telah melakukan kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dalam mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Kegiatan ini berdasarkan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggunakan 9 (sembilan) indikator utama dan dijabarkan dalam beberapa sub indikator. Berikutnya, dengan adanya agenda internasional dalam *SDGs* di atas, maka mulai tahun 2017 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan pada tanggal 24 Juli 2017 untuk mengakomodir konsep pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

Tabel 1 Integrasi Indikator dalam SDGs dengan Sub Indikator dalam IPK

TARGET SDGs	INDIKATOR SDGs	SUB INDIKATOR IPK
8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	5.2. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan	8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	3.2 Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non Pertanian (LPINP)

TARGET SDGs	INDIKATOR SDGs	SUB INDIKATOR IPK
lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.		3.3. Proporsi LPINP Untuk Laki-laki 3.4. Proporsi LPINP Untuk Perempuan
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	4.1. Tingkat Kesempatan Kerja Formal
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	3.5. Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja	8. Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam (upah riil) Terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per Jam (upah kebijakan)
	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2.3. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	2.4. Persentase Setengah Penganggur
8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	2.1. Persentase NEET (15-24 tahun)
8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan	8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis	2.2. Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 Tahun)

KEMNAKER

TARGET SDGs	INDIKATOR SDGs	SUB INDIKATOR IPK
manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)	
8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	7.2. Tingkat Kecelakaan Kerja
	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	7.1. Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan
	8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait	6.3. Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan*
8.B Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan *the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.*	8.B.1.(a) Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	9.1. Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 9.2. Tingkat Pekerja Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

KEMNAKER

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional sebesar 2,12 poin, yakni dari 61,33 pada 2020 menjadi 63,45 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2020-2021. Kondisi perekonomian yang mulai membaik seiring dengan menurunnya status PPKM sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan ketenagakerjaan, sehingga nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan juga ikut meningkat.

Secara umum dari 34 provinsi, pada tahun ini mayoritas provinsi mengalami peningkatan Indeks yaitu sebanyak 26 provinsi sedangkan 8 provinsi mengalami penurunan Indeks. Jika melihat status pembangunan keyenagakerjaan, mayoritas provinsi tidak mengalami perubahan status pembangunan ketenagakerjaan yakni sebanyak 28 provinsi, lalu 4 provinsi mengalami peningkatan status pembangunan ketenagakerjaan, dan 2 provinsi lainnya mengalami penurunan status pembangunan ketenagakerjaan.

Hasil Pengukuran IPK Tahun 2021 ini menunjukkan masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus dilakukan mengingat masalah ketenagakerjaan berada di muara dari berbagai permasalahan yang ada dari hulu hingga hilirnya. Permasalahan seperti pendidikan, kondisi keluarga dan lingkungan, kemudahan berinvestasi, bahkan pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh melambat di beberapa negara turut berpotensi mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar isu ketenagakerjaan berada pada titik sentral dari pembangunan negara secara keseluruhan. Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak dan pada akhirnya menjadi cermin tingkat kemajuan pembangunan negara. Untuk itu, selain dari komitmen juga diperlukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh provinsi dapat meningkatkan nilai IPK.

KEMNAKER



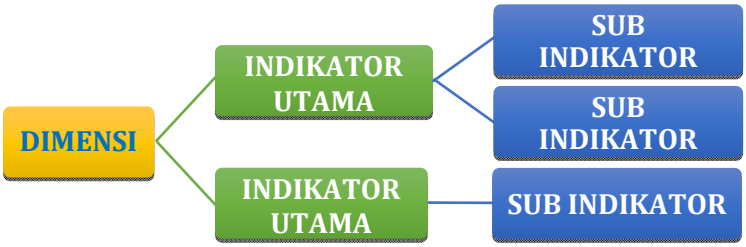
BAB 2
DIMENSI INDIKATOR UTAMA DAN SUB INDOKATOR

Indikator utama dan sub indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tetap fleksibel mengikuti dinamika konsep pembangunan dunia. Untuk itu, sejak tahun 2017 lalu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) telah terintegrasi dengan agenda pembangunan dunia yang disebut *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada agenda *SDGs* Nomor 8 yakni pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dengan mengintegrasikan *SDGs* ke dalam IPK maka hasil pengukuran IPK dapat digunakan untuk mendukung pencapaian *SDGs*. Tetapi, meskipun telah dilakukan penyesuaian metodologi pengukuran IPK dengan konsep *SDGs,* hasilnya tetap tidak mengganggu konsistensi keterbandingan dengan hasil IPK di masa lalu, sehingga *trend* hasil IPK tetap dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu.

Pada hakekatnya, Indeks pembangunan ketenagakerjaan merujuk pada empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Berdasarkan empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan tersebut, disusunlah Dimensi yang merepresentasikan masing-masing tujuan tersebut di atas, sehingga tersusunlah 4 Dimensi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Dimensi kemudian diurai menjadi Indikator yang menggambarkan 9 aktivitas utama pembangunan ketenagakerjaan, sehingga tersusunlah 9 Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Indikator Utama diurai kembali menjadi Sub Indikator, yang merupakan kegiatan pokok dari setiap Indikator Utama. Setiap Indikator Utama memiliki Sub Indikator, sehingga tersusunlah 25 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2020 mengacu pada Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 dimana metodologi pengukuran sudah diintegrasikan dengan *SDGs.* Pasca integrasi dimaksud, jumlah indikator utama yang diukur tetap 9 indikator utama, namun jumlah sub indikator yang diukur bertambah menjadi 25 subindikator.

KEMNAKER



Grafik 1 Sistematika Dimensi, Indikator Utama dan Sub Indikator Dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Dimensi, Indikator Utama dan Sub Indikator tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Agenda *SDGs* Nomor 8 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Berikut akan diuraikan secara lengkap mengenai Dimensi, Indikator Utama dan Sub Indikator dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

DIMENSI

Empat Dimensi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan adalah :

1. Dimensi pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja.
   Dimensi ini merepresentasikan tujuan pertama pembangunan ketenagakerjaan, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Dimensi pemerataan kesempatan kerja.
   Dimensi ini merepresentasikan tujuan kedua pembangunan ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Dimensi perlindungan tenaga kerja.
   Dimensi ini merepresentasikan tujuan ketiga pembangunan ketenagakerjaan, yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Dimensi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
   Dimensi ini merepresentasikan tujuan keempat pembangunan ketenagakerjaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

INDIKATOR UTAMA

Sembilan Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan adalah uraian dari Dimensi yang menggambarkan 9 aktivitas utama pembangunan ketenagakerjaan. Berikut adalah 9 Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan :

1. Indikator Perencanaan Tenaga Kerja
   Masuk dalam Dimensi Pertama. Indikator ini menggambarkan efektifitas peran Perencanaan Tenaga Kerja dan sebagai *guidance* dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa mendatang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs ke-8.

KEMNAKER

2. Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja
   Masuk dalam Dimensi Pertama. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam suatu perekonomian untuk memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal dan manusiawi.

3. Indikator Kesempatan Kerja
   Masuk dalam Dimensi Kedua. Indikator ini menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.

4. Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja
   Masuk dalam Dimensi Kedua. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memberikan, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional dan daerah.

5. Indikator Produktivitas Tenaga Kerja
   Masuk dalam Dimensi Pertama. Indikator ini menggambarkan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.

6. Indikator Hubungan Industrial
   Masuk dalam Dimensi Ketiga. Indikator ini menggambarkan efektivitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*), sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.

7. Indikator Kondisi Lingkungan Kerja
   Masuk dalam Dimensi Ketiga. Indikator ini menggambarkan efektifitas perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas buruh/pekerja/karyawan dan profitabilitas perusahaan.

8. Indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja
   Masuk dalam Dimensi Keempat. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam suatu perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

9. Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja
   Masuk dalam Dimensi Keempat. Indikator ini menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam memberikan perlindungan dasar bagi angkatan kerja terhadap risiko bekerja, dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

SUB INDIKATOR

Sub Indikator merupakan kegiatan pokok dari Sembilan Indikator Utama. Artinya, setiap Indikator memiliki sub indikator. Jumlah sub indikator yang dimiliki setiap indikator utama sangat bervariasi, ada yang hanya satu, ada pula yang lebih dari satu. Total, terdapat 25 Sub Indikator dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Berikut akan diuraikan 25 Sub Indikator dimaksud, berdasarkan Indikator Utama-nya.

- **Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja**, terdiri dari 1 sub indikator:

  1. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi
     Gambaran efektifitas peran perencanaan tenaga kerja sebagai acuan dan pedoman untuk memecahkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di setiap provinsi

sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan provinsi kepada 4 tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan (sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan Agenda *SDGs* Nomor 8.

- **Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja**, terdiri dari 4 sub indikator yaitu:

1. Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan atau *Not in Education, Employment, or Training* (*NEET*)
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs.* Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk menurunkan jumlah Penduduk Usia Muda yang tidak produktif.
2. Persentase Anak (10-17 tahun) yang Bekerja
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk menghapus dan mengurangi anak yang bekerja (*working children*)maupun pekerja anak (*child workers*) demi menghindarkan mereka dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta mengembangkan intelektualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu untuk pembangunan di masa depan.
3. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
   Sebagai gambaran kemampuan suatu perekonomian untuk menyediakan kesempatan kerja dalam jumlah yang memadai kepada angkatan kerja.
4. Persentase Setengah Penganggur
   Sebagai gambaran kemampuan suatu perekonomian untuk mengoptimalkan pendayagunaan angkatan kerja, yang menjamin angkatan kerja dapat bekerja secara penuh (minimum 35 jam per minggu).

- **Indikator Utama Kesempatan Kerja**, terdiri dari 5 sub indikator yaitu:

1. Tingkat Kesempatan Kerja Formal
   Sebagai gambaran kemampuan suatu perekonomian untuk menyediakan kesempatan kerja berkualitas, yaitu memiliki hubungan kerja yang pasti, kondisi kerja terlindungi (*secure*), dan tingkat kesejahteraan lebih baik.
2. Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP)
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, yaitu dengan mentransformasi lapangan pekerjaan informal di sektor non-pertanian menjadi usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP) Untuk Laki-Laki
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong laki-laki untuk berinovasi sehingga terbentuk secara masif usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP) Untuk Perempuan
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong perempuan untuk berinovasi sehingga terbentuk secara masif usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran efektifitas kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan untuk

KEMNAKER

menurunkan proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal sektor pertanian sebagai proksi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja terlindungi.

- **Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja**, terdiri dari 3 sub indikator:

1. Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja
   Sebagai gambaran kemampuan pemerintah dalam menyediakan kapasitas terpasang yang memadai di seluruh lembaga pelatihan kerja pemerintah (BLK) untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan Kompetensi Kerja.
2. Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja
   Sebagai gambaran kemampuan pemerintah menghasilkan lulusan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah (BLK) maupun swasta, untuk program pelatihan dengan durasi paling sedikit 50 (lima puluh) jam pelatihan kerja.
3. Tingkat Lembaga Latihan Yang Terakreditasi
   Sebagai gambaran ketersediaan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta yang berkualitas atau terstandardisasi dalam jumlah yang memadai.

- **Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja**, terdiri dari 2 sub indikator:

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
   Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.
2. Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja
   Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran perubahan (peningkatan/penurunan) kemampuan tenaga kerja nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menghasilkan barang dan jasa.

- **Indikator Utama Hubungan Industrial**, terdiri dari 4 sub indikator :

1. Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) Yang Disahkan
   Sebagai gambaran kemampuan pemerintah untuk menjamin tersedianya pedoman tertulis bagi pengusaha dan buruh/pekerja/ karyawan di seluruh perusahaan, yang mengatur hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis.
2. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan
   Sebagai gambaran kemampuan pemerintah untuk menjamin tersedianya sarana hubungan industrial yang mampu mengakomodir secara optimal seluruh keinginan unsur buruh/pekerja/karyawan dan pengusaha sehingga dapat meredam tuntutan pekerja yang berlebihan, menjamin kelangsungan usaha, mendorong peningkatan daya saing, meningkatkan produktifitas kerja serta kesejahteraan buruh/pekerja/ karyawan dan keluarganya.
3. Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan
   Sebagai gambaran kemampuan pemerintah untuk membangun forum komunikasi dan konsultasi bidang Hubungan Industrial di perusahaan untuk mengkomunikasikan kebijakan pengusaha, menampung aspirasi buruh/pekerja/karyawan, melakukan deteksi dini, dan menyampaikan saran/pendapat sehingga terjamin kelangsungan usaha dan ketenangan kerja (*industrial peace*).
4. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial
   Sebagai gambaran gambaran kualitas Hubungan Industrial di suatu wilayah serta gambaran kemampuan dan keberhasilan pemerintah untuk menjaga ketenangan berusaha dan bekerja.

- **Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja**, terdiri dari 3 sub indikator:

  1. Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan
     Sebagai gambaran keberhasilan pemerintah untuk mendorong penerapan SMK3 yang terintegrasi di setiap perusahaan secara luas.
  2. Tingkat Kecelakaan Kerja
     Sebagai gambaran efektifitas program perlindungan tenaga kerja dalam mencegah dan menurunkan Kecelakaan Kerja secara luas.
  3. Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketengakerjaan di Perusahaan
     Sebagai gambaran kemampuan dan keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

- **Indikator Utama Pengupahan Dan Kesejahteraan Pekerja**, terdiri dari 1 sub indikator :

  1. Proporsi besaran upah rata-rata per jam kerja terhadap upah minimum provinsi per jam
     Merupakan sub indikator berbasis *SDGs*. Sub indikator ini sebagai gambaran kemampuan pemerintah untuk mendorong suatu perekonomian agar mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang semakin baik kepada para pekerja dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

- **Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, terdiri dari 2 sub indikator :

  1. Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek
     Sebagai gambaran kemampuan pemerintah untuk mendorong setiap perusahaan menyediakan perlindungan dasar bagi pekerja dalam bentuk jaminan sosial.
  2. Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota Jamsostek Aktif
     Sebagai gambaran ketersediaan perlindungan dasar bagi pekerja terhadap risiko bekerja, dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BOBOT

Bobot adalah persentase yang diberikan terhadap Indikator Utama dan Sub Indikator. **Bobot Indikator Utama** merupakan persentase indikator utama dari total bobot seluruh indikator utama. **Bobot Sub Indikator** merupakan persentase sub indikator dari Total Bobot Indikator Utama-nya.

Berikut adalah daftar Bobot Indikator Utama dan Bobot Sub Indikator yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan berdasarkan Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

KEMNAKER

Tabel 2 Daftar Bobot Indikator Utama dan Bobot Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indikator Utama & Sub Indikator	Bobot	
	Indikator Utama	Sub Indikator
Perencanaan Tenaga Kerja	**10**	
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi		100
Penduduk dan Tenaga Kerja	**10**	
Persentase NEET (15-24 tahun)		20
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)		20
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)		30
Persentase Setengah Pengangguran		30
Kesempatan Kerja	**15**	
Persentase Tenaga Kerja Formal		40
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP)		20
Proporsi LPINP untuk Laki-laki		15
Proporsi LPINP untuk Perempuan		15
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)		20
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**15**	
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja		30
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja		40
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi		30
Produktivitas Tenaga Kerja	**10**	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		60
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja		40
Hubungan Industrial	**10**	
Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) Yang Disahkan		30
Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan		25
Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan		20
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial		25
Kondisi Lingkungan Kerja	**10**	
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan		40
Tingkat Kecelakaan Kerja		30
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan		30
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10**	
Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP Per Jam		100
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10**	
Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan		40
Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yg mjd Peserta BPJS Ketenagakerjaan		60

KEMNAKER

KRITERIA

Kriteria adalah acuan dalam bentuk Nilai Maksimum dan Nilai Minimum, yang digunakan dalam menilai dan mengukur suatu Sub Indikator. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum ini merupakan ambang batas capaian terbaik dan terburuk suatu Sub Indikator. Untuk suatu Sub Indikator yang diharapkan capaiannya semakin besar, maka ambang batas terbaiknya adalah Nilai Maksimum. Untuk suatu Sub Indikator yang diharapkan capaiannya semakin rendah, maka ambang batas terbaiknya adalah Nilai Minimum. Kriteria yang digunakan mengacu pada Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Berikut adalah daftar lengkap Nilai Maksimum dan Nilai Minimum 25 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang telah berbasis *SDGs*.

Tabel 3 Daftar Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Sub Indikator dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indikator Utama & Sub Indikator	Bobot		Satuan
	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	
Perencanaan Tenaga Kerja			
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	0	100	%
Penduduk dan Tenaga Kerja			
Persentase NEET (15-24 tahun)	3	40	%
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	0	40	%
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	3	15	%
Persentase Setengah Pengangguran	0	15	%
Kesempatan Kerja			
Persentase Tenaga Kerja Formal	20	55	%
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP)	30	85	%
Proporsi LPINP untuk Laki-laki	30	85	%
Proporsi LPINP untuk Perempuan	30	85	%
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)	75	100	%
Pelatihan dan Kompetensi Kerja			
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0	10	%
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0	10	%
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0	100	%
Produktivitas Tenaga Kerja			
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	25	100	Juta/TK
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,1	10	%
Hubungan Industrial			
Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) Yang Disahkan	0	100	%
Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan	0	100	%
Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	0	100	%
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0	10	%

Indikator Utama & Sub Indikator	Bobot		Satuan
	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	
Kondisi Lingkungan Kerja			
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	10	30	%
Tingkat Kecelakaan Kerja	0	1	%
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0	75	%
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja			
Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP Per Jam	0	120	%
Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
Tingkat Perusahaan yg mjd Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0	15	%
Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yg mjd Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0	20	%

KEMNAKER



BAB 3
METODE PENGHITUNGAN

Dalam melakukan penghitungan angka Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan suatu provinsi digunakan berbagai data yang berasal dari berbagai sumber. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan validasi untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara bertahap. Berikut akan dijelaskan metodologi yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dari mulai akuisisi data hingga teknik penghitungannya.

DATA DAN SUMBER DATA

Pada prinsipnya ada 2 jenis data yang digunakan, yakni Data Ketenagakerjaan Umum dan Data Ketenagakerjaan Khusus. Akuisisi Data dilakukan melalui pekerjaan lapangan menggunakan Kuesioner serta permohonan langsung pada instansi penerbit data di internal maupun eksternal Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk lebih lengkapnya, berikut diuraikan Instansi yang menjadi sumber data beserta jenis datanya.

1. Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. Data yang dihimpun, yaitu:
   a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusun perencanaan tenaga kerja;
   b. tim penyusun perencanaan tenaga kerja;
   c. perencanaan tenaga kerja;
   d. pelatihan kerja dan kompetensi kerja;
   e. produktivitas tenaga kerja;
   f. hubungan industrial;
   g. kondisi lingkungan kerja;
   h. pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan
   i. jaminan sosial tenaga kerja.
2. Badan Pusat Statistik. Data yang dihimpun, yaitu:
   a. penduduk usia muda yang tidak sedang sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan;
   b. penduduk yang bekerja;
   c. pekerja anak;
   d. penganggur terbuka;
   e. setengah penganggur;
   f. upah rata-rata tenaga kerja
   g. jumlah perusahaan menurut Sensus Ekonomi; dan
   h. Produk Domestik Regional Bruto.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Data yang dihimpun, yaitu:
   a. jumlah perusahaan yang menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. jumlah pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah yang menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang aktif membayar dan menyetor iuran;
   c. jumlah pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah yang menderita Kecelakaan Kerja dan mengajukan klaim.
4. Unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI

KEMNAKER

5. Data yang dihimpun meliputi seluruh data dan informasi yang bersifat ketenagakerjaan, baik yang bersifat umum maupun bersifat teknis. Data yang dihimpun, yaitu:
   a. perencanaan tenaga kerja;
   b. pelatihan kerja;
   c. produktivitas tenaga kerja;
   d. hubungan industrial;
   e. kondisi lingkungan kerja;
   f. pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan
   g. jaminan sosial tenaga kerja

TAHAPAN PENGHITUNGAN

IPK merupakan suatu indeks komposit yang dihitung menggunakan bobot indikator utama, bobot sub indikator dan nilai minimum-maksimum (kriteria pengukuran) tiap-tiap sub indikator. Proses penghitungan IPK, terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. menghitung nilai aktual tiap-tiap sub indikator;
2. menghitung nilai indeks tiap-tiap sub indikator menggunakan nilai aktual, bobot dan nilai minimum-maksimum (kriteria pengukuran);
3. menghitung nilai indeks tiap-tiap indikator utama dengan menjumlahkan nilai indeks seluruh sub indikator pada tiap-tiap indikator utama;
4. menghitung nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan nasional, provinsi atau kabupaten/kota (komposit) dengan menjumlahkan nilai indeks 9 (sembilan) indikator utama; dan
5. penetapan status pembangunan ketenagakerjaan.

Penghitungan Nilai Aktual Sub Indikator

Nilai aktual dihitung untuk setiap sub indikator menggunakan formula yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Data yang digunakan untuk mendapatkan nilai aktual setiap sub indikator sesuai dengan yang tertera di atas. Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai cara memperoleh nilai aktual 25 sub indikator.

Sub Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi

Nilai aktual sub indikator ini diperoleh berdasarkan penilaian terhadap 3 hal, yakni (1) ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja yang masih berlaku; (2) ada tidaknya fungsi perencanaan tenaga kerja pada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; serta (3) kualitas dan kelengkapan unsur substansi buku, seperti akurasi proyeksi dan kelengkapan rekomendasi kebijakan dalam dokumen perencanaan ketenagakerjaan tersebut. Nilai aktual PTKP/PTKK diharapkan terus meningkat.

Sub Indikator Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (Not in Education, Employment or Training/NEET)

Persentase NEET merupakan rasio antara jumlah Penduduk Usia Muda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan dengan jumlah Penduduk Usia Muda. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

KEMNAKER

Sub Indikator Persentase Anak (10-17 tahun) Yang Bekerja

Persentase Anak Yang Bekerja merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja usia 10-17 tahun dengan jumlah populasi penduduk usia 10-17 tahun. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Penganggur Terbuka

Tingkat penganggur terbuka merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan total angkatan kerja. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Persentase Setengah Penganggur

Persentase Setengah Penganggur merupakan rasio jumlah pekerja tidak penuh terpaksa (bekerja di bawah 35 jam per minggu) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal

Persentase Tenaga Kerja Formal merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja secara formal dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP)

Proporsi LPINP merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja secara informal di sektor non-pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP) bagi Laki-laki

Proporsi LPINP bagi Laki-laki merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian secara informal dan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk yang bekerja laki-laki di sektor non-pertanian. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian (LPINP) bagi Perempuan

Proporsi LPINP bagi Perempuan merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian secara informal dan berjenis kelamin perempuan dengan jumlah penduduk yang bekerja perempuan di sektor non-pertanian. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)

Proporsi LPIP merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja secara informal di sektor informal (pertanian dengan total penduduk yang bekerja di sektor pertanian). Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja

Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja merupakan hasil perkalian dari rasio jumlah daya tampung lembaga pelatihan kerja pemerintah (BLK) yang ada di kabupaten/kota dengan jumlah penganggur berpendidikan SMTP-SMTA dan rasio jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga pelatihan kerja pemerintah (BLK) dengan jumlah kabupaten/kota. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja

Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja merupakan rasio antara jumlah lulusan pelatihan kerja dengan jumlah penganggur berpendidikan SMTP-SMTA. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi

Tingkat Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi merupakan rasio antara jumlah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan swasta yang terakreditasi dengan total lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan rasio antara Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja diperoleh dengan mencari seberapa besar pertumbuhan PDRB per tenaga kerja tahun ke-t dibandingkan PDRB per tenaga kerja tahun t-1. PDRB yang digunakan yaitu PDRB dengan harga konstan tahun 2010. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan

Tingkat PP yang disahkan merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan

Tingkat PKB yang didaftarkan merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan jumlah perusahaan wajib lapor. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan

Tingkat LKS Bipartit di perusahaan merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki LKS Bipartit dengan jumlah perusahaan berskala menengah-besar yang wajib lapor. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Tingkat PHI adalah rasio antara jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapor. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan

Tingkat penerapan SMK3 di perusahaan merupakan rasio antara jumlah perusahaan yang telah diaudit SMK3 dengan jumlah perusahaan besar menurut sensus ekonomi. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Kecelakaan Kerja

Tingkat kecelakaan kerja merupakan rasio antara jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja dengan status pekerja/karyawan. Semakin rendah nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan merupakan rasio antara jumlah perusahaan yang telah melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2005 dengan total perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar hasil Sensus Ekonomi 2016. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Proporsi Upah Rata-rata per Jam terhadap UMP per Jam

Proporsi Upah Rata-rata per Jam terhadap UMP per Jam merupakan hasil dari rasio upah rata-rata pekerja dengan rata-rata jam kerja dibagi rasio upah minimum provinsi dengan rata-rata jam kerja. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan rasio antara jumlah perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif dengan jumlah perusahaan yang wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Sub Indikator Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif

Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif merupakan rasio antara jumlah Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang aktif membayar dan menyetor iuran dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual sub indikator ini, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

KEMNAKER

Penghitungan Indeks Sub Indikator

Indeks sub indikator yaitu nilai yang mencerminkan kualitas tiap-tiap sub indikator yang dihitung menggunakan nilai aktual, bobot dan kriteria pengukuran tiap-tiap sub indikator. Terdapat 2 (dua) cara yang digunakan untuk menghitung nilai indeks sub indikator, yaitu **Pertama**, penghitungan Nilai Indeks Sub indikator dengan Nilai Aktual diharapkan Semakin Tinggi (sehingga semakin tinggi nilai aktualnya semakin tinggi indeks sub indikatornya); dan **Kedua,** penghitungan Nilai Indeks Sub indikator dengan Nilai Aktual diharapkan Semakin Rendah (sehingga semakin rendah nilai aktualnya semakin tinggi indeks sub indikatornya).

Penghitungan Indeks Tiap-Tiap Indikator Utama

Indeks indikator utama yaitu nilai yang mencerminkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan pada tiap-tiap indikator utama yang dihitung dengan menjumlahkan nilai indeks seluruh sub indikator pada tiap-tiap indikator utama dimaksud.

Penghitungan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Dan Provinsi (Komposit)

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun suatu provinsi secara keseluruhan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan indeks 9 Indikator Utama Nasional maupun di suatu Provinsi.

Penetapan Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Indeks Komposit Provinsi kemudian ditetapkan Status Pembangunan Ketenagakerjaan setiap Provinsi. Status ini memberikan gambaran secara kualitatif kondisi pembangunan ketenagakerjaan setiap provinsi. Dengan demikian, hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini memberikan gambaran hasil pembangunan ketenagakerjaan secara kuantitatif (dalam bentuk angka Indeks) dan juga gambaran secara kualitatif (dalam bentuk Status).

Penetapan Tingkatan Status mengacu pada Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017. Berikut adalah Acuan Penetapan Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan berdasarkan Kepmenaker dimaksud.

Tabel 4 Tingkatan Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Tingkatan Status	Indeks Komposit
Rendah	<50,00
Menengah Bawah	50,00 - 65,99
Menengah Atas	66,00 – 79,99
Tinggi	≥80,00

KEMNAKER





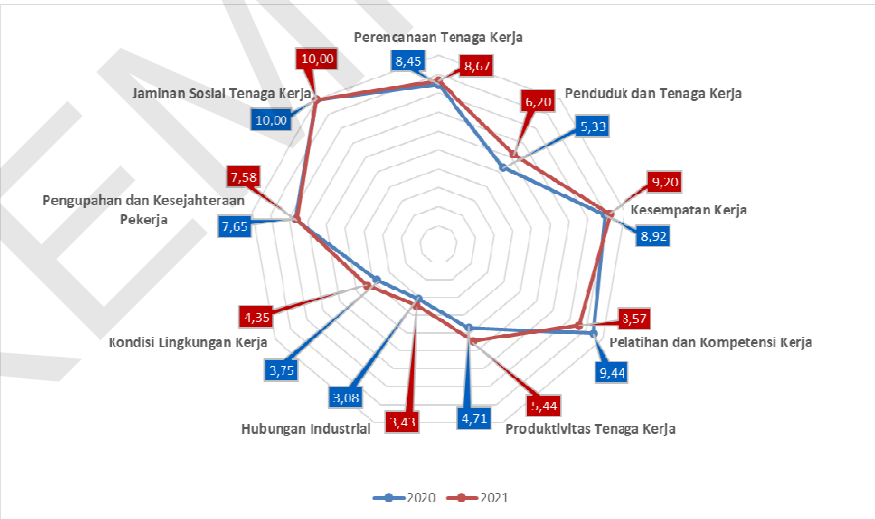
BAB 4
HASIL PENGUKURAN

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 dijabarkan ke dalam 2 Bagian, yaitu Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Secara Nasional dan Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dari masing-masing Provinsi.

NASIONAL

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional sebesar 2,12 poin, yakni dari 61,33 pada 2020 menjadi 63,45 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2020-2021. Kondisi perekonomian yang mulai membaik seiring dengan menurunnya status PPKM sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan ketenagakerjaan, sehingga nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan juga ikut meningkat.

Hasil Pengukuran IPK Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa enam dari sembilan indikator utama mengalami peningkatan indeks, yaitu Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Kondisi Lingkungan Kerja. 1 Indikator Utama indeksnya tetap yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang sejak tahun 2020 sudah mencapai nilai maksimal dan bertahan di tahun 2021. 2 Indikatir Utama lainnya mengalami penurunan, yaitu Pelatihan dan Kompetensi Kerja serta Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.



Grafik 2 Perbandingan Nilai Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2020-2021

Tabel 5 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks	
	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,45**	**8,67**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,45	8,67
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,33**	**6,20**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,85	0,95
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,53	1,87
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,98	2,13
Persentase Setengah Pengangguran	0,96	1,26
Kesempatan Kerja	**8,92**	**9,20**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,35	3,52
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian	1,99	2,02
Proporsi LPINP untuk Laki-laki	1,66	1,68
Proporsi LPINP untuk Perempuan	1,24	1,28
Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP)	0,69	0,69
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**9,44**	**8,57**
Tingkat Kapasistas Pelatihan KErja	2,94	2,89
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	2,97
Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	0,50	2,71
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,71**	**5,44**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,71	4,79
Laju Pertumbuhan PRDB per Tenaga kerja	0,00	0,65
Hubungan Industrial	**3,08**	**3,43**
Tingkat Peraturan (PP) yang Disahkan	0,80	0,59
Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan	0,13	0,10
Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	0,36	0,41
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,79	2,33
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,75**	**4,35**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	1,57	1,59
Tingkat Kecelakan Kerja	0,78	0,71
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,39	2,05
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,65**	**7,58**
Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP	7,65	7,58
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**
Tingkat Perusahaan yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00
Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yang menjadi Peserta BPJS	6,00	6,00
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	**61,33**	**63,45**

Tabel 6 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2021

Provinsi	IPK	Peringkat	Status
DKI Jakarta	72,83	1	Menengah Atas
Kalimantan Utara	71,44	2	Menengah Atas
Kepulauan Bangka Belitung	71,09	3	Menengah Atas
DI Yogyakarta	70,47	4	Menengah Atas
Kalimantan Timur	67,73	5	Menengah Atas
Kalimantan Selatan	67,61	6	Menengah Atas
Sulawesi Utara	66,23	7	Menengah Atas
Kepulauan Riau	65,92	8	Menengah Bawah
Kalimantan Tengah	65,84	9	Menengah Bawah
Sulawesi Tengah	65,34	10	Menengah Bawah
Sumatera Barat	64,23	11	Menengah Bawah
Sulawesi Selatan	64,20	12	Menengah Bawah
Gorontalo	63,85	13	Menengah Bawah
Jawa Timur	62,15	14	Menengah Bawah
Bali	61,21	15	Menengah Bawah
Jawa Tengah	61,17	16	Menengah Bawah
Maluku	60,67	17	Menengah Bawah
Jawa Barat	60,52	18	Menengah Bawah
Nusa Tenggara Barat	60,12	19	Menengah Bawah
Jambi	59,19	20	Menengah Bawah
Maluku Utara	58,86	21	Menengah Bawah
Kalimantan Barat	57,59	22	Menengah Bawah
Sumatera Utara	57,27	23	Menengah Bawah
Banten	57,07	24	Menengah Bawah
Bengkulu	56,49	25	Menengah Bawah
Riau	55,74	26	Menengah Bawah
Sulawesi Barat	55,11	27	Menengah Bawah
Sumatera Selatan	53,68	28	Menengah Bawah
Lampung	53,05	29	Menengah Bawah
Sulawesi Tenggara	51,57	30	Menengah Bawah
Nusa Tenggara Timur	45,24	31	Rendah
Papua	40,43	32	Rendah
Papua Barat	38,79	33	Rendah
Aceh	36,29	34	Rendah

KEMNAKER

Secara umum dari 34 provinsi, pada tahun 2021 mayoritas provinsi mengalami peningkatan Indeks yaitu sebanyak 26 provinsi sedangkan 8 provinsi mengalami penurunan Indeks. Jika melihat status pembangunan ketenagakerjaan, mayoritas provinsi tidak mengalami perubahan status pembangunan ketenagakerjaan yakni sebanyak 28 provinsi, lalu 4 provinsi mengalami peningkatan status pembangunan ketenagakerjaan, dan 2 provinsi lainnya mengalami penurunan status pembangunan ketenagakerjaan.

Jumlah provinsi dengan IPK status Menengah Atas berjumlah 7 provinsi, jumlah yang sama dengan hasil IPK tahun 2020 sebanyak 7 provinsi. Jumlah provinsi dengan IPK status Menengah Bawah berjumlah 23 provinsi, bertambah jika dibandingkan hasil IPK tahun 2020 sebanyak 20 provinsi. Jumlah provinsi dengan IPK status Rendah berjumlah 4 provinsi, berkurang jika dibandingkan hasil IPK tahun 2020 sebanyak 7 provinsi.

Penghargaan berdasarkan 9 Indikator Utama diberikan pada 7 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dan Penduduk dan Tenaga Kerja, Kepulauan Riau terbaik pada Indikator Utama Kesempatan Kerja, Nusa Tenggara Barat terbaik pada Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Sulawesi Tengah terbaik pada Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja, Sulawesi Utara terbaik pada Indikator Utama Hubungan Industrial, DKI Jakarta terbaik pada Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja dan Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Jawa Barat terbaik pada Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

Tabel 7 Provinsi Dengan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Tahun 2021

No	Indikator Utama	Provinsi	Indeks
1	Perencanaan Tenaga Kerja	DI Yogyakarta	9,85
2	Penduduk dan Tenaga Kerja	DI Yogyakarta	7,86
3	Kesempatan Kerja	Kepulauan Riau	14,47
4	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Nusa Tenggara Barat	13,49
5	Produktivitas Tenaga Kerja	Sulawesi Tengah	9,86
6	Hubungan Industrial	Sulawesi Utara	5,50
7	Kondisi Lingkungan Kerja	DKI Jakarta	9,85
8	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Jawa Barat	10,00
9	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DKI Jakarta	10,00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permenaker Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, maka urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan telah dipetakan berdasarkan intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan di daerah yang bersangkutan. Konsekuensinya, ada Provinsi yang memiliki tingkat intensitas dan beban kerja ketenagakerjaan dengan kategori Besar, Sedang, dan Kecil, untuk itu pemberian penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan sejak Tahun 2017 juga melihat hasil pemetaan urusan tersebut. Dengan demikian, diberikan penghargaan kepada 3 provinsi dengan indeks tertinggi pada masing-masing kategori.

Tabel 8 Provinsi dengan IPK Terbaik Berdasarkan Tipologi Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar		
No	**Provinsi**	**Indeks**
1	Sulawesi Selatan	64,20
2	Jawa Timur	62,15
3	Jawa Tengah	61,17
Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sedang		
No	**Provinsi**	**Indeks**
1	DKI Jakarta	72,83
2	DI Yogyakarta	70,47
3	Kalimantan Timur	67,73
Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil		
No	**Provinsi**	**Indeks**
1	Kalimantan Utara	71,44
2	Kepulauan Bangka Belitung	71,09
3	Sulawesi Tengah	65,34

Sejak dimulainya pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan hingga saat ini dari kesembilan indikator utama belum ada yang mencapai nilai indeks penuh. Hal ini menunjukkan masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dilakukan mengingat masalah ketenagakerjaan berada di muara dari berbagai permasalahan yang ada dari hulu hingga hilirnya. Permasalahan seperti pendidikan, kondisi keluarga dan lingkungan, kemudahan berinvestasi, bahkan pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh melambat di beberapa negara turut berpotensi mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar isu ketenagakerjaan berada pada titik sentral dari pembangunan negara secara keseluruhan. Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak dan pada akhirnya menjadi cermin tingkat kemajuan pembangunan negara. Untuk itu, selain dari komitmen juga diperlukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh provinsi dapat meningkatkan nilai IPK.

KEMNAKER



PROVINSI

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja pembangunan ketenagakerjaan setiap Provinsi yang disorot menggunakan 9 Indikator Utama dan 25 Sub Indikator.

Di regional Sumatera, mayoritas provinsi telah mencapai status “Menengah Bawah” dengan Indeks berkisar antara 36,29-71,09. Indeks tertinggi di regional Sumatera ini diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indeks Terendah diperoleh Provinsi Aceh. Di regional Sumatera, semua provinsi telah mencapai nilai IPK di atas 50,00 kecuali Provinsi Aceh.

Di regional Jawa, Indeks berkisar diantara 57,07-72,83. Mayoritas provinsi telah mencapai status “Menengah Bawah” dengan Indeks yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Sisanya sebanyak 2 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masih berstatus “Menengah Atas”.

Di regional Kalimantan, Indeks berkisar diantara 57,59-71,44. Mayoritas provinsi telah mencapai status “Menengah Atas” dengan Indeks yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sisanya sebanyak 2 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih berstatus “Menengah Bawah”.

Di regional Sulawesi, 1 Provinsi telah mencapai status “Menengah Atas”, sedangkan 5 sisanya berstatus “Menengah Bawah”. 1 Provinsi telah mencapai status “Menengah Atas” yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Di regional ini, hanya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan Besar. Sisanya memiliki intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan Sedang atau Kecil.

Di regional Balnusa, terdapat 2 Provinsi yang mendapatkan status pembangunan ketenagakerjaan “Menengah Bawah” dan 1 provinsi dengan status pembangunan ketenagakerjaan “Rendah”.

Di regional Maluku dan Papua, 2 Provinsi telah mencapai status “Menengah Bawah”, sedangkan 2 sisanya berstatus “Rendah”. 2 Provinsi telah mencapai status “Menengah Bawah” yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Di regional ini, hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan Kecil. Sisanya memiliki intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan Sedang.

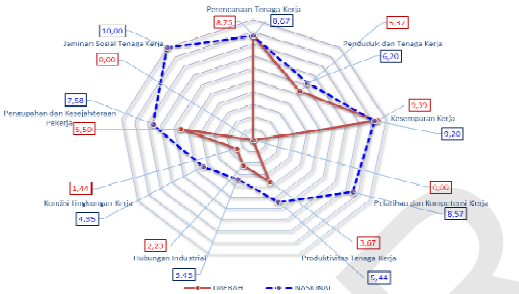
Berikut diuraikan secara lengkap dan rinci hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 untuk 34 Provinsi.

KEMNAKER

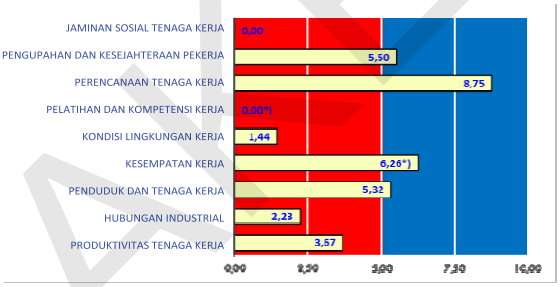
Provinsi Aceh

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh berada di peringkat ke-34 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-17 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 4 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 5 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 8,75%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 36,29% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Aceh pada tahun 2021 dalam Status Rendah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Aceh nilai turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-32 menjadi peringkat ke-34.Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh di urutan ke-10 dari 10 provinsi.

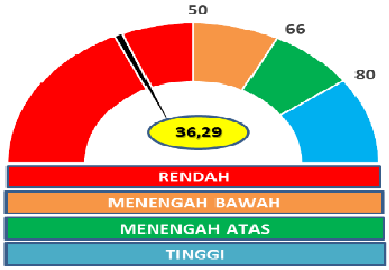


Grafik 3 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 4 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2021



Grafik 5 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2021

Tabel 9 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

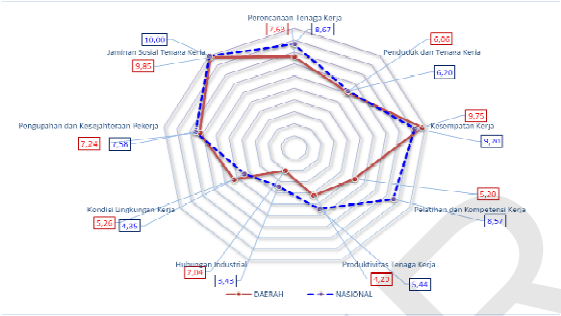
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,65**	**8,75**	▲	**86,50**	**87,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,65	8,75	▲	86,50	87,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,59**	**5,32**	▲	**54,41**	**45,23**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,89	0,84	▼	23,60	24,38
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,60	1,93	▲	8,02	1,39
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,10	2,17	▲	6,59	6,30
Persentase Setengah Pengangguran	0,00	0,37	▲	16,18	13,16
Kesempatan Kerja	**9,00**	**9,39**	▲	**267,93**	**265,10**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,11	3,31	▲	38,12	39,31
Proporsi LPINP	2,04	2,11	▲	47,59	46,29
Proporsi LPINP Laki-laki	1,61	1,66	▲	45,54	44,46
Proporsi LPINP Perempuan	1,40	1,48	▲	50,69	48,90
Proporsi LPIP	0,84	0,83	▼	85,99	86,14
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**8,44**	**0,00**	▼	**21,48**	**-**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,19	0,00	▼	4,87	-
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	0,00	▼	11,16	-
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,25	0,00	▼	5,45	-
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,46**	**3,67**	▲	**48,71**	**59,73**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,46	2,58	▲	55,00	57,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,09	▲	(6,29)	2,73
Hubungan Industrial	**2,48**	**2,23**	▼	**0,31**	**1,09**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,01	0,00	▼	0,18	-
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,00	▼	0,02	-
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,47	2,23	▼	0,11	1,09
Kondisi Lingkungan Kerja	**0,00**	**1,44**	▲	**23,00**	**135,89**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	▬	23,00	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,00	1,44	▲	-	35,89
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,31**	**5,50**	▼	**75,67**	**66,00**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,31	5,50	▼	75,67	66,00
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**0,00**	**0,00**	▬	**0,00**	**0,00**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	0,00	0,00	▬	0,00	0,00
Provinsi Aceh	**41,92**	**36,29**	▼		

KEMNAKER

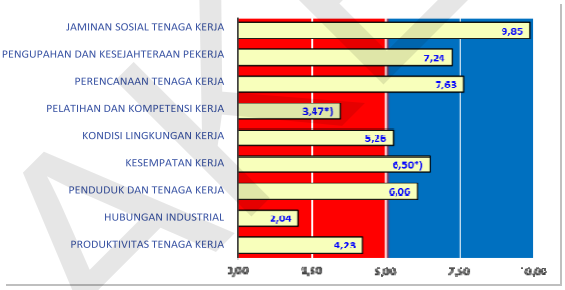
Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat ke-23 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-6 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 9,85%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 57,27% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sumatera Utara nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-22 menjadi peringkat ke-23. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara di urutan ke-5 dari 10 provinsi.

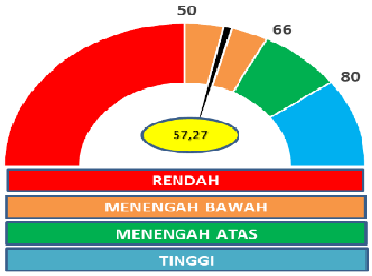


Grafik 6 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 7 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021



Grafik 8 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 10 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021

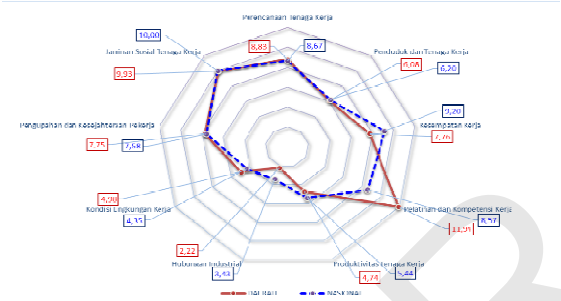
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,08**	**7,63**	▼	**80,75**	**76,34**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,08	7,63	▼	80,75	76,34
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,02**	**6,06**	▲	**57,16**	**41,12**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,93	1,07	▲	22,87	20,29
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,15	1,76	▲	16,96	4,83
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,02	2,17	▲	6,91	6,33
Persentase Setengah Pengangguran	0,91	1,07	▲	10,43	9,67
Kesempatan Kerja	**9,62**	**9,75**	▲	**266,89**	**265,38**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,49	3,54	▲	40,38	40,67
Proporsi LPINP	2,02	2,04	▲	48,02	47,53
Proporsi LPINP Laki-laki	1,71	1,73	▲	43,13	42,81
Proporsi LPINP Perempuan	1,24	1,28	▲	54,60	53,72
Proporsi LPIP	1,15	1,16	▲	80,76	80,66
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,80**	**5,20**	▲	**14,30**	**21,25**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,38	0,52	▲	0,85	1,15
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	1,95	4,08	▲	3,25	6,80
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,46	0,60	▲	10,20	13,29
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,80**	**4,23**	▼	**79,39**	**76,78**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,24	4,23	▼	78,00	77,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,56	0,00	▼	1,39	(0,22)
Hubungan Industrial	**3,14**	**2,04**	▼	**40,99**	**28,91**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,13	0,63	▲	4,18	20,97
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,09	0,04	▼	3,53	1,61
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,65	0,03	▼	32,39	1,68
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,28	1,34	▼	0,90	4,65
Kondisi Lingkungan Kerja	**1,83**	**5,26**	▲	**43,75**	**68,87**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	2,89	▲	6,93	24,47
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,39	0,62	▲	0,87	0,79
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,44	1,74	▲	35,96	43,61
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,30**	**7,24**	▼	**87,64**	**86,87**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,30	7,24	▼	87,64	86,87
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**9,85**	▼	**124,58**	**134,12**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	101,76	114,60
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	5,85	▼	22,82	19,52
Provinsi Sumatera Utara	**52,58**	**57,27**	▲		

KEMNAKER

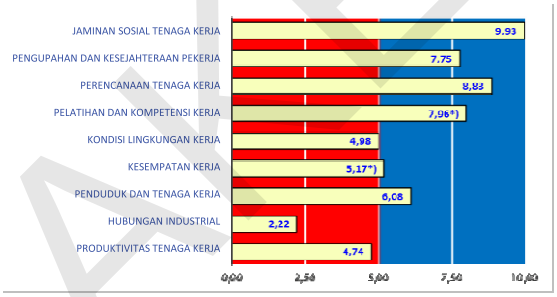
Provinsi Sumatera Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke-11 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-8 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 9,93%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 64,23% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sumatera Barat nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-11. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatra, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat di urutan ke-3 dari 10 provinsi.

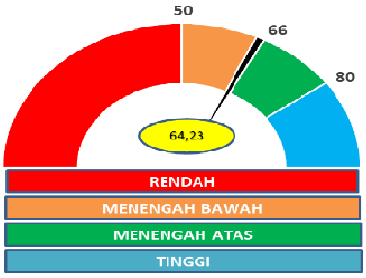


Grafik 9 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 10 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Grafik 11 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

PENYAKER

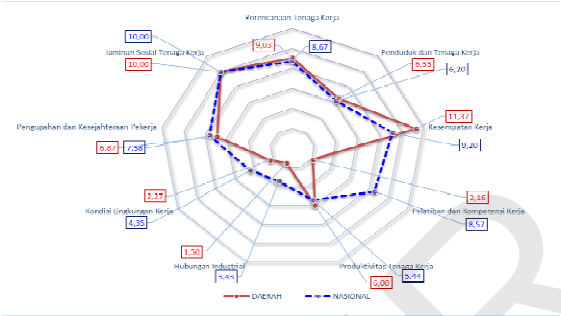
Tabel 11 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,13**	**8,83**	▲	**81,25**	**88,25**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,13	8,83	▲	81,25	88,25
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,89**	**6,08**	▲	**52,59**	**38,21**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,06	1,15	▲	20,46	18,78
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,38	1,87	▲	12,33	2,64
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,03	2,12	▲	6,88	6,52
Persentase Setengah Pengangguran	0,41	0,94	▲	12,93	10,28
Kesempatan Kerja	**7,29**	**7,76**	▲	**283,65**	**280,27**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,35	2,61	▲	33,72	35,23
Proporsi LPINP	1,72	1,82	▲	53,44	51,56
Proporsi LPINP Laki-laki	1,41	1,49	▲	50,59	48,46
Proporsi LPINP Perempuan	1,14	1,21	▲	57,01	55,37
Proporsi LPIP	0,67	0,62	▼	88,89	89,65
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**12,42**	**11,94**	▼	**83,36**	**78,48**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	3,87	3,69	▼	8,60	8,19
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	6,00	–	18,08	20,29
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,55	2,25	▼	56,68	50,00
Produktivitas Tenaga Kerja	**3,25**	**4,74**	▲	**61,82**	**70,30**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,25	3,42	▲	65,00	67,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,32	▲	(3,18)	3,30
Hubungan Industrial	**5,53**	**2,22**	▼	**129,89**	**10,61**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,41	0,23	▼	46,84	7,63
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,38	0,00	▼	15,29	0,06
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	1,35	0,02	▼	67,34	0,81
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,40	1,97	▼	0,42	2,11
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,86**	**4,98**	▲	**44,84**	**52,53**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	1,09	0,81	▼	15,44	14,04
Tingkat Kecelakaan Kerja	1,61	2,64	▲	0,46	0,12
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,16	1,53	▲	28,94	38,37
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,78**	**7,75**	▼	**93,32**	**92,97**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,78	7,75	▼	93,32	92,97
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**8,76**	**9,93**	▲	**95,16**	**99,70**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	79,30	79,92
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	4,76	5,93	▲	15,86	19,78
Provinsi Sumatera Barat	**61,90**	**64,23**	▲		

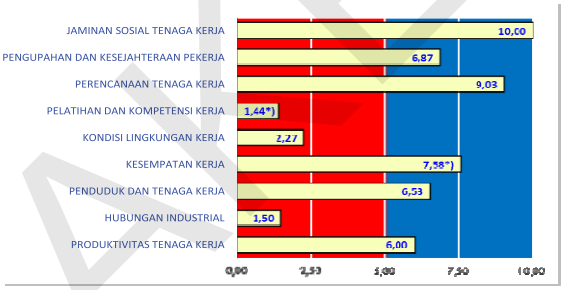
Provinsi Riau

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau berada di peringkat ke-26 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-14 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 55,74% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Riau pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Riau nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-20 menjadi peringkat ke-26. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau di urutan ke-7 dari 10 provinsi.

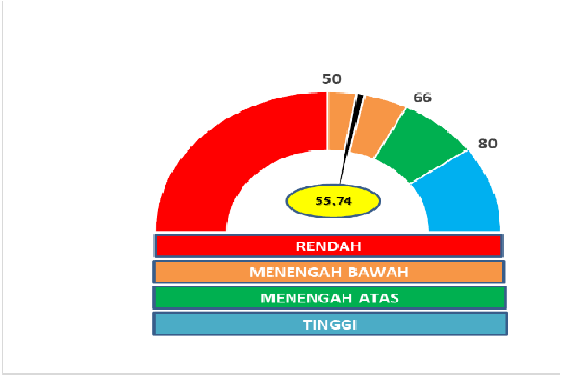


Grafik 12 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 13 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2021



Grafik 14 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2021

Tabel 12 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2020-2021

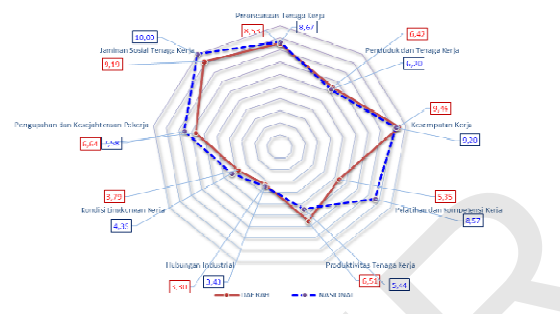
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,88**	**9,03**	▲	**88,75**	**90,33**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,88	9,03	▲	88,75	90,33
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,26**	**6,53**	▲	**50,32**	**38,36**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,89	1,02	▲	23,62	21,11
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,57	1,86	▲	8,51	2,87
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,17	2,64	▲	6,32	4,42
Persentase Setengah Pengangguran	0,63	1,01	▲	11,87	9,95
Kesempatan Kerja	**11,03**	**11,37**	▲	**253,66**	**250,66**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,12	4,36	▲	44,03	45,43
Proporsi LPINP	2,20	2,23	▲	44,66	44,07
Proporsi LPINP Laki-laki	1,86	1,91	▲	39,46	38,24
Proporsi LPINP Perempuan	1,35	1,36	▲	51,98	51,64
Proporsi LPIP	1,50	1,50	–	73,54	71,28
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,61**	**2,16**	▼	**4,78**	**15,95**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,76	0,43	▼	1,69	0,96
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	1,85	1,14	▼	3,09	1,90
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	0,59	▲	-	13,10
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,00**	**6,00**	–	**158,59**	**159,23**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	–	162,00	160,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	–	(3,41)	(0,77)
Hubungan Industrial	**3,10**	**1,50**	▼	**97,45**	**25,91**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,52	0,40	▼	50,76	13,17
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,46	0,04	▼	18,34	1,55
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,42	0,10	▼	21,15	5,05
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,70	0,97	▲	7,20	6,14
Kondisi Lingkungan Kerja	**0,89**	**2,27**	▲	**30,58**	**163,67**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	–	6,83	6,83
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	–	1,49	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,89	2,27	▲	22,26	56,84
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,00**	**6,87**	▼	**84,00**	**82,42**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,00	6,87	▼	84,00	82,42
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	–	**118,64**	**117,94**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	90,12	91,36
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	–	28,52	26,58
Provinsi Riau	**54,77**	**55,74**	▲		

KEMNAKER

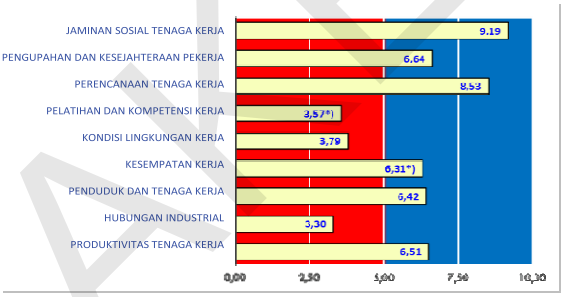
Provinsi Jambi

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi berada di peringkat ke-20 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-6 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 9,19%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 59,19% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jambi pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Jambi nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-20. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi di urutan ke-4 dari 10 provinsi.

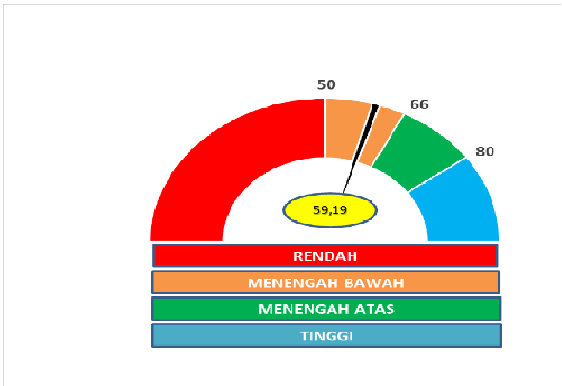


Grafik 15 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 16 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2021



Grafik 17 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2021

VERIFIKASI

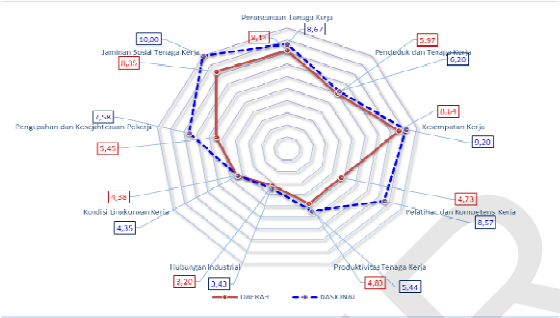
Tabel 13 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,73**	**8,53**	▼	**87,25**	**85,27**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,73	8,53	▼	87,25	85,27
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,77**	**6,42**	▲	**46,67**	**38,46**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,94	0,99	▲	22,66	21,76
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,62	1,91	▲	7,63	1,86
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,47	2,48	▲	5,13	5,09
Persentase Setengah Pengangguran	0,75	1,05	▲	11,25	9,75
Kesempatan Kerja	**9,17**	**9,46**	▲	**262,01**	**259,02**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,96	3,08	▲	37,26	37,99
Proporsi LPINP	2,07	2,13	▲	47,11	45,97
Proporsi LPINP Laki-laki	1,72	1,76	▲	42,85	42,05
Proporsi LPINP Perempuan	1,27	1,35	▲	54,03	52,08
Proporsi LPIP	1,15	1,14	▼	80,75	80,93
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**10,06**	**5,35**	▼	**61,57**	**39,79**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,51	1,33	▼	5,59	2,96
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	2,55	▼	21,73	4,26
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,54	1,47	▼	34,25	32,58
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,83**	**6,51**	▲	**81,36**	**91,66**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,83	5,05	▲	85,00	88,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,46	▲	(3,64)	3,66
Hubungan Industrial	**4,82**	**3,30**	▼	**120,48**	**51,24**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,52	0,74	▼	50,80	24,82
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,49	0,24	▼	19,46	9,74
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,95	0,29	▼	47,66	14,73
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,86	2,01	▲	2,56	1,94
Kondisi Lingkungan Kerja	**1,71**	**3,79**	▲	**53,59**	**55,03**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	9,69	2,64
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	1,71	▲	1,17	0,43
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,71	2,08	▲	42,73	51,96
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,99**	**6,64**	▼	**83,87**	**79,70**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,99	6,64	▼	83,87	79,70
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**7,44**	**9,19**	▲	**110,08**	**116,15**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	98,61	98,86
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	3,44	5,19	▲	11,47	17,29
Provinsi Jambi	**59,52**	**59,19**	▼		

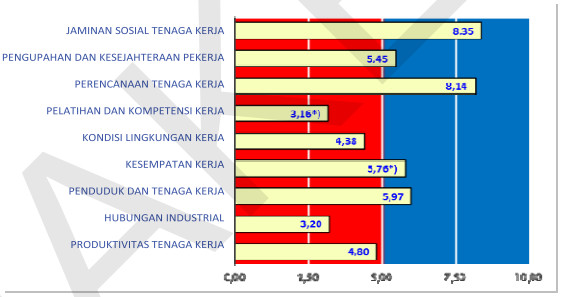
Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-7 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5)
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 8,35%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 53,68% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sumatera Selatan nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-25 menjadi peringkat ke-28. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan di urutan ke-8 dari 10 provinsi.

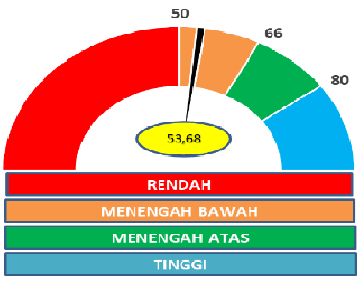


Grafik 18 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 19 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021



Grafik 20 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Tabel 14 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021

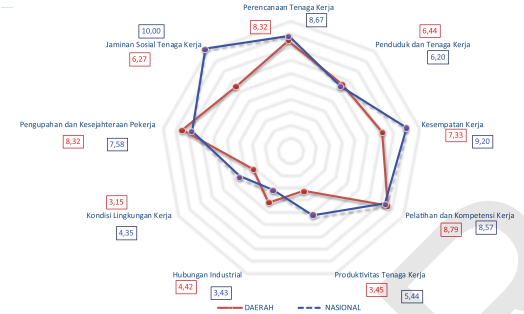
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,70**	**8,14**	▼	**87,00**	**81,42**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,70	8,14	▼	87,00	81,42
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,09**	**5,97**	▲	**53,35**	**44,05**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,78	0,79	▲	25,55	25,38
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,53	1,86	▲	9,30	2,76
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,37	2,50	▲	5,51	4,98
Persentase Setengah Pengangguran	0,40	0,81	▲	12,98	10,93
Kesempatan Kerja	**8,28**	**8,64**	▲	**268,41**	**265,77**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,53	2,72	▲	34,74	35,84
Proporsi LPINP	1,94	2,01	▲	49,42	48,20
Proporsi LPINP Laki-laki	1,63	1,72	▲	45,07	42,91
Proporsi LPINP Perempuan	1,21	1,22	▲	55,33	55,12
Proporsi LPIP	0,97	0,98	▲	83,87	83,70
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**6,24**	**4,73**	▼	**35,35**	**23,11**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,20	2,55	▲	4,89	5,66
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	2,88	1,52	▼	4,80	2,53
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,15	0,67	▼	25,65	14,93
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,16**	**4,80**	▲	**74,97**	**79,39**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,16	4,25	▲	77,00	78,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,56	▲	(2,03)	1,39
Hubungan Industrial	**2,58**	**3,20**	▲	**59,49**	**71,13**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,79	1,05	▲	26,49	34,87
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,25	0,30	▲	9,92	12,04
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,36	0,40	▲	17,81	20,03
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,18	1,45	▲	5,27	4,19
Kondisi Lingkungan Kerja	**4,21**	**4,38**	▲	**48,88**	**52,00**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,46	2,05	▲	12,30	20,25
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,30	1,09	▼	0,23	0,64
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,45	1,24	▼	36,34	31,12
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,11**	**5,45**	▼	**73,32**	**65,41**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,11	5,45	▼	73,32	65,41
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**6,00**	**8,35**	▲	**36,20**	**79,96**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	4,00	▲	-	65,46
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	4,35	▼	36,20	14,50
Provinsi Sumatera Selatan	**51,38**	**53,68**	▲		

KEMNAKER

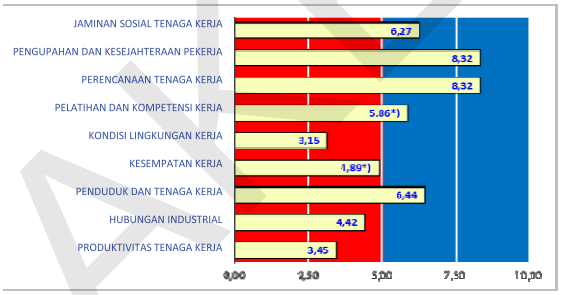
Provinsi Bengkulu

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu berada di peringkat ke-25 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-13 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 8,32%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Kondisi Lingkungan Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 56,49% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Bengkulu nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-23 menjadi peringkat ke-25. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu di urutan ke-6 dari 10 provinsi.

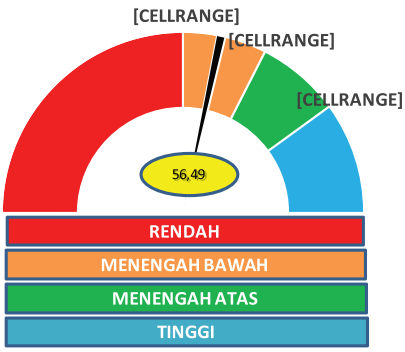


Grafik 21 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2021



Grafik 22 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021

*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10



Grafik 23 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021

Tabel 15 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

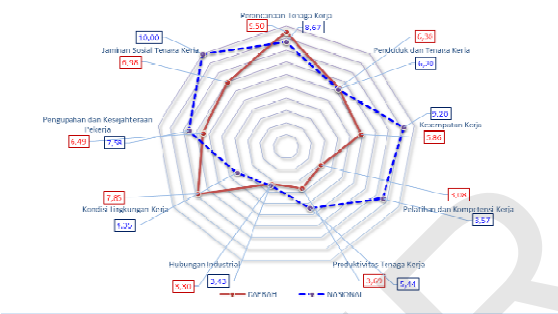
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,77**	**8,32**	▼	**87,67**	**83,17**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,77	8,32	▼	87,67	83,17
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,71**	**6,44**	▲	**46,76**	**39,50**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,05	0,93	▼	20,63	22,75
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,55	1,90	▲	8,96	1,94
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,73	2,84	▲	4,07	3,65
Persentase Setengah Pengangguran	0,38	0,77	▲	13,09	11,16
Kesempatan Kerja	**7,08**	**7,33**	▲	**273,89**	**273,91**
Persentase Tenaga Kerja Formal	1,85	2,03	▲	30,77	31,84
Proporsi LPINP	1,87	1,85	▼	50,69	51,00
Proporsi LPINP Laki-laki	1,51	1,46	▼	48,13	49,20
Proporsi LPINP Perempuan	1,27	1,29	▲	54,07	53,39
Proporsi LPIP	0,59	0,69	▲	90,24	88,48
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**11,09**	**8,79**	▼	**35,01**	**32,55**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,50	2,48	▼	11,63	5,51
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	5,51	▼	10,28	9,18
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,59	0,80	▲	13,10	17,86
Produktivitas Tenaga Kerja	**1,59**	**3,45**	▲	**41,11**	**50,26**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,59	1,75	▲	44,00	46,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,70	▲	(2,89)	4,26
Hubungan Industrial	**2,91**	**4,42**	▲	**26,31**	**91,68**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	0,77	▲	-	25,83
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,24	▲	-	9,50
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,52	1,11	▲	25,89	55,56
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,39	2,30	▼	0,42	0,80
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,29**	**3,15**	▼	**55,16**	**43,08**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	3,33
Tingkat Kecelakaan Kerja	1,11	1,57	▲	0,63	0,48
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	2,18	1,57	▼	54,53	39,27
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,16**	**8,32**	▲	**97,96**	**99,88**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,16	8,32	▲	97,96	99,88
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**3,62**	**6,27**	▲	**12,08**	**66,95**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	4,00	▲	-	59,39
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	3,62	2,27	▼	12,08	7,56
Provinsi Bengkulu	**52,23**	**56,49**	▲		

KEMNAKER

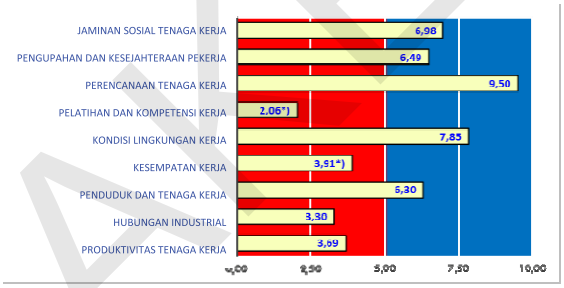
Provinsi Lampung

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung berada di peringkat ke-29 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-8 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 9,50%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 53,05% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Lampung nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-26 menjadi peringkat ke-29. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung di urutan ke-9 dari 10 provinsi.

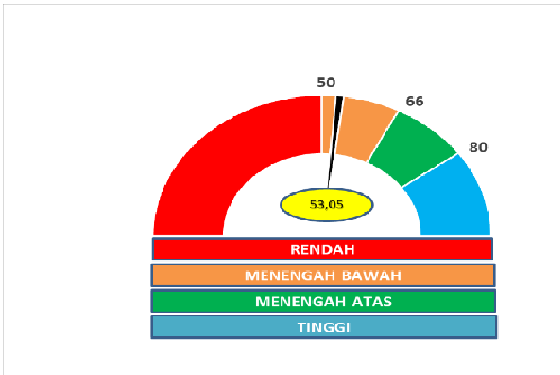


Grafik 24 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 25 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2021



Grafik 26 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2021

Tabel 16 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

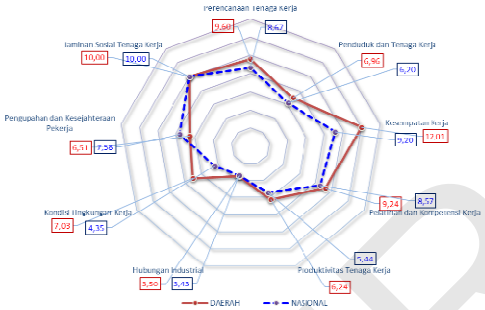
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,53**	**9,50**	▼	**95,25**	**95,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,53	9,50	▼	95,25	95,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,21**	**6,30**	▲	**54,03**	**40,66**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,90	0,97	▲	23,35	22,09
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,36	1,82	▲	12,83	3,56
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,58	2,58	▼	4,67	4,69
Persentase Setengah Pengangguran	0,36	0,93	▲	13,18	10,33
Kesempatan Kerja	**5,60**	**5,86**	▲	**291,92**	**290,61**
Persentase Tenaga Kerja Formal	1,33	1,49	▲	27,74	28,69
Proporsi LPINP	1,50	1,54	▲	57,50	56,70
Proporsi LPINP Laki-laki	1,27	1,28	▲	54,06	53,62
Proporsi LPINP Perempuan	0,93	0,98	▲	62,15	60,95
Proporsi LPIP	0,57	0,56	▼	90,48	90,65
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**7,55**	**3,08**	▼	**41,22**	**42,01**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,44	0,69	▲	0,98	1,54
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	0,61	▼	15,66	1,02
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,11	1,77	▲	24,58	39,44
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,49**	**3,69**	▲	**52,18**	**59,69**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,49	2,61	▲	56,00	57,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,08	▲	(3,82)	2,69
Hubungan Industrial	**3,45**	**3,30**	▼	**40,04**	**34,95**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,64	0,49	▼	21,18	16,40
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,11	0,09	▼	4,59	3,55
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,28	0,29	▲	13,95	14,68
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,42	2,42	▲	0,32	0,32
Kondisi Lingkungan Kerja	**4,27**	**7,85**	▲	**39,95**	**96,49**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,94	4,00	▲	14,68	63,99
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,33	2,55	▲	0,22	0,15
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,00	1,29	▲	25,05	32,36
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,41**	**6,49**	▲	**76,90**	**77,90**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,41	6,49	▲	76,90	77,90
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**6,74**	**6,98**	▲	**60,50**	**69,21**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	51,37	59,28
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	2,74	2,98	▲	9,13	9,93
Provinsi Lampung	**51,23**	**53,05**	▲		

KEMNAKER

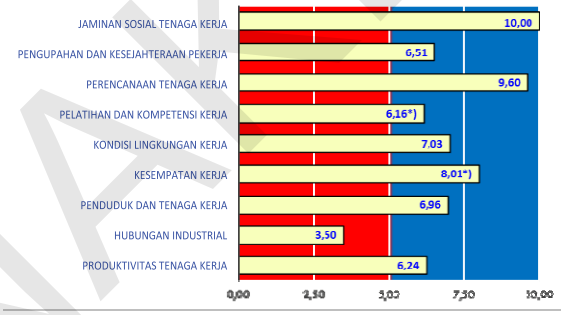
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat ke-3 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-2 dari 8 provinsidengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 8 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 1 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 71,09% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-30 menjadi peringkat ke-3. StatusPembangunanKetenagakerjaann yamengalami peningkatan dari Rendah ke Menengah Atas.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks PembangunanKetenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di urutan ke-1 dari 10 provinsi.

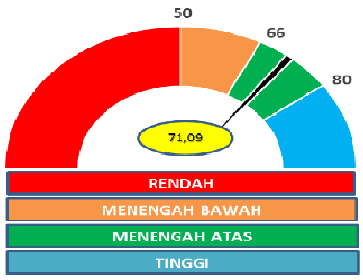


Grafik 27 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 28 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



Grafik 29 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tabel 17 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021

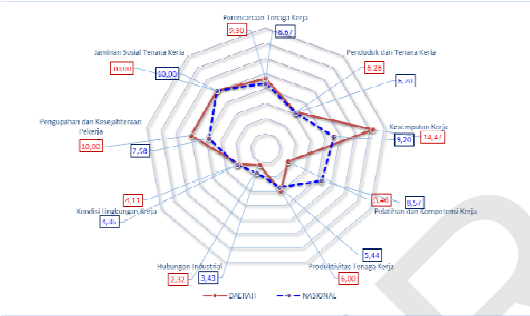
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**6,78**	**9,60**	▲	**67,75**	**96,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	6,78	9,60	▲	67,75	96,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,78**	**6,96**	▲	**52,20**	**38,77**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,68	0,84	▲	27,34	24,38
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,48	1,84	▲	10,50	3,30
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,44	2,49	▲	5,25	5,03
Persentase Setengah Pengangguran	1,18	1,79	▲	9,11	6,05
Kesempatan Kerja	**11,84**	**12,01**	▲	**251,04**	**252,59**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,64	4,98	▲	47,07	49,07
Proporsi LPINP	2,31	2,24	▼	42,74	43,98
Proporsi LPINP Laki-laki	1,84	1,77	▼	40,14	41,74
Proporsi LPINP Perempuan	1,55	1,52	▼	46,99	47,81
Proporsi LPIP	1,50	1,50	▬	74,10	69,98
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**5,48**	**9,24**	▲	**10,66**	**76,30**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,76	0,61	▼	6,14	1,35
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	2,72	6,00	▲	4,53	16,41
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	2,63	▲	-	58,54
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,02**	**6,24**	▲	**72,99**	**82,82**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,02	4,31	▲	75,00	78,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,93	▲	(2,01)	4,82
Hubungan Industrial	**0,66**	**3,50**	▲	**40,77**	**61,35**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,49	1,25	▲	16,41	41,69
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,17	0,24	▲	6,82	9,61
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,15	▲	-	7,48
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	1,86	▲	17,54	2,56
Kondisi Lingkungan Kerja	**1,96**	**7,03**	▲	**40,07**	**71,15**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,31	4,00	▲	11,54	32,69
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,54	1,51	▲	0,82	0,50
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,11	1,52	▲	27,71	37,96
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**5,99**	**6,51**	▲	**71,82**	**78,13**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	5,99	6,51	▲	71,82	78,13
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**5,34**	**10,00**	▲	**17,81**	**84,07**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	4,00	▲	-	63,71
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,34	6,00	▲	17,81	20,36
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**47,84**	**71,09**	▲		

KEMNAKER

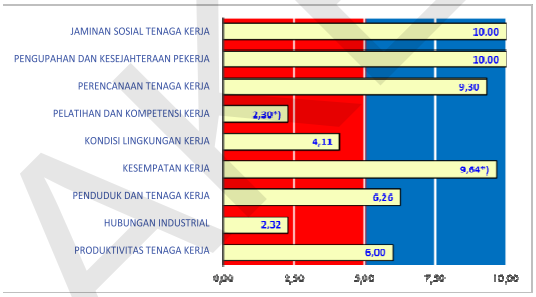
Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang diukurmenggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaanmenunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat ke-8 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-6 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 65,92% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kepulauan Riau nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-8. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya mengalami penurunan dari Menengah Atas ke Menengah Bawah.
- Di regional Pulau Sumatera, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau di urutan ke-2 dari 10 provinsi.

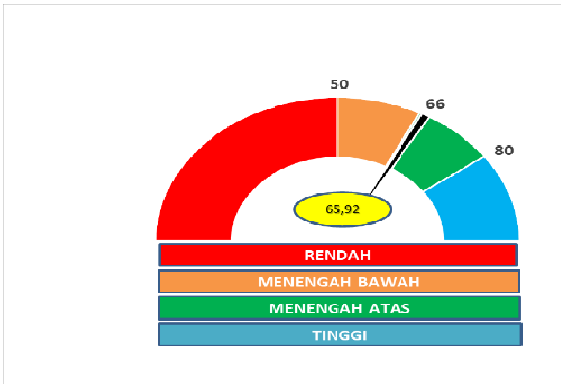


Grafik 30 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 31 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Grafik 32 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

UNMAKER

Tabel 18 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021

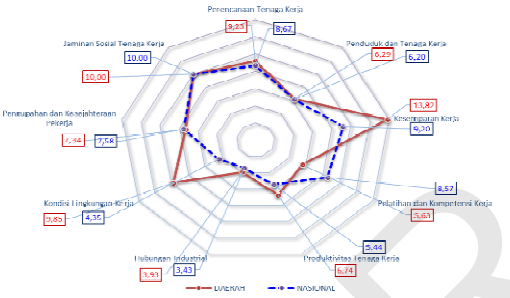
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,26**	**9,30**	▲	**82,64**	**93,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,26	9,30	▲	82,64	93,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,88**	**6,26**	▲	**40,28**	**33,47**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,04	1,27	▲	20,71	16,42
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,83	1,95	▲	3,49	0,97
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,17	1,27	▲	10,34	9,91
Persentase Setengah Pengangguran	1,85	1,77	▼	5,75	6,17
Kesempatan Kerja	**14,28**	**14,47**	▲	**240,96**	**238,07**
Persentase Tenaga Kerja Formal	6,00	6,00	–	64,59	64,80
Proporsi LPINP	2,95	2,95	▼	30,87	30,93
Proporsi LPINP Laki-laki	2,25	2,25	–	27,11	27,15
Proporsi LPINP Perempuan	1,97	1,97	▲	36,80	36,75
Proporsi LPIP	1,10	1,29	▲	81,59	78,46
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,56**	**3,46**	▲	**45,67**	**56,01**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,51	0,26	▼	1,14	0,57
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,05	0,76	▲	0,08	1,27
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,00	2,44	▲	44,44	54,17
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,00**	**6,00**	–	**165,57**	**162,69**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	–	172,00	166,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	–	(6,43)	(3,31)
Hubungan Industrial	**0,34**	**2,32**	▲	**36,27**	**11,70**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,19	0,18	▼	6,30	6,04
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,02	0,02	▲	0,80	0,81
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,13	0,06	▼	6,71	3,07
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	2,06	▲	22,46	1,78
Kondisi Lingkungan Kerja	**9,70**	**4,11**	▼	**144,32**	**113,74**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	0,35	▼	62,94	11,73
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,70	0,77	▼	0,10	0,74
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	3,00	3,00	–	81,28	101,27
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10,00**	**10,00**	–	**135,00**	**130,95**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	10,00	10,00	–	135,00	130,95
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	–	**219,12**	**203,92**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	167,25	158,21
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	–	51,88	45,71
Provinsi Kepulauan Riau	**67,03**	**65,92**	▼		

KEMNAKER

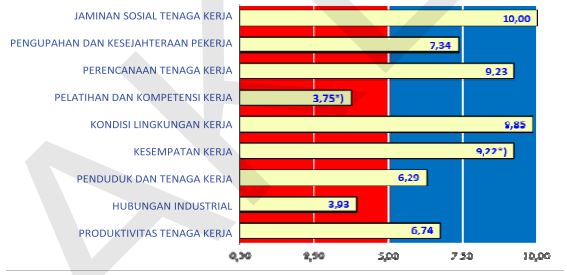
Provinsi DKI Jakarta

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat ke-1 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-1 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 72,83% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi DKI Jakarta nilai indeksnya turun dan peringkatnya tetap di urutan ke-1. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta di urutan ke-1 dari 6 provinsi.

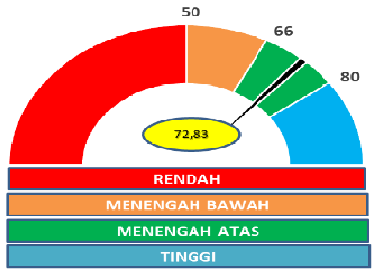


Grafik 33 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 34 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021



Grafik 35 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Tabel 19 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

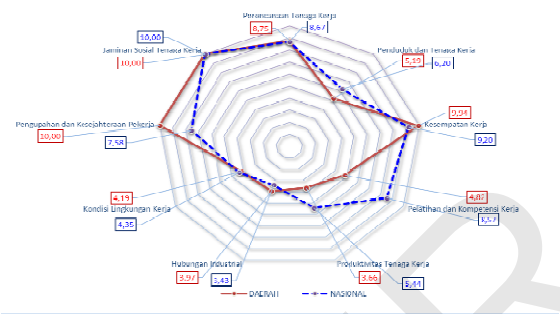
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,08**	**9,23**	▲	**90,75**	**92,25**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,08	9,23	▲	90,75	92,25
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,65**	**6,29**	▲	**40,50**	**36,54**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,07	1,06	▼	20,17	20,47
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,85	1,96	▲	2,96	0,82
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,01	1,63	▲	10,95	8,50
Persentase Setengah Pengangguran	1,71	1,65	▼	6,43	6,76
Kesempatan Kerja	**13,83**	**13,82**	▼	**225,73**	**230,30**
Persentase Tenaga Kerja Formal	6,00	6,00	–	61,78	61,74
Proporsi LPINP	2,55	2,55	▼	38,16	38,16
Proporsi LPINP Laki-laki	2,00	2,02	▲	36,20	35,56
Proporsi LPINP Perempuan	1,78	1,75	▼	41,40	42,31
Proporsi LPIP	1,50	1,50	–	48,19	52,53
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**11,95**	**5,63**	▼	**91,33**	**48,44**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,50	2,09	▼	29,53	4,64
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	1,70	▼	29,51	2,83
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,45	1,84	▲	32,29	40,97
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,68**	**6,74**	▲	**385,70**	**392,86**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	–	384,00	391,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,68	0,74	▲	1,70	1,86
Hubungan Industrial	**4,86**	**3,93**	▼	**123,96**	**68,89**
Tingkat PP Yang Disahkan	2,42	0,74	▼	80,80	24,70
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,26	0,06	▼	10,32	2,47
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,58	0,82	▲	29,22	40,94
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,60	2,31	▲	3,61	0,78
Kondisi Lingkungan Kerja	**5,82**	**9,85**	▲	**51,80**	**155,61**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	1,77	4,00	▲	18,83	35,64
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,74	2,85	▲	0,09	0,05
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,32	3,00	▲	32,88	119,92
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,23**	**7,34**	▼	**98,79**	**88,05**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,23	7,34	▼	98,79	88,05
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	–	**255,96**	**263,88**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	133,65	139,07
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	–	122,31	124,81
Provinsi DKI Jakarta	**76,11**	**72,83**	▼		

KEMNAKER

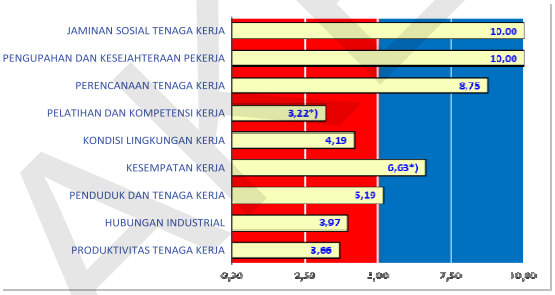
Provinsi Jawa Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-4 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 60,52% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Jawa Barat nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-18. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat di urutan ke-5 dari 6 provinsi.

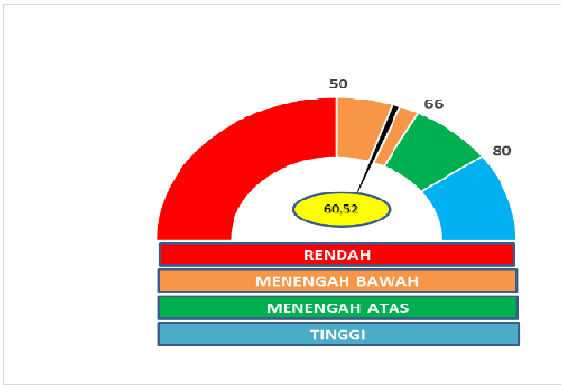


Grafik 36 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 37 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Grafik 38 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 20 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

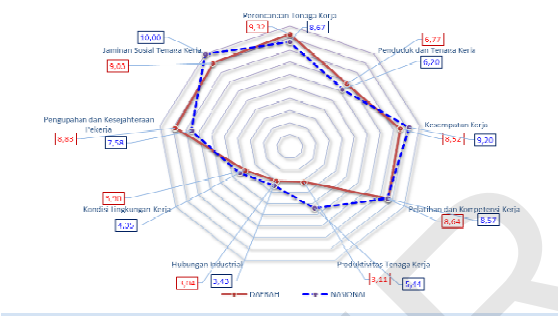
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,68**	**8,75**	▲	**86,75**	**87,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,68	8,75	▲	86,75	87,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,43**	**5,19**	▲	**54,57**	**46,66**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,58	0,73	▲	29,33	26,44
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,78	1,92	▲	4,46	1,60
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,13	1,29	▲	10,46	9,82
Persentase Setengah Pengangguran	0,94	1,24	▲	10,31	8,80
Kesempatan Kerja	**9,68**	**9,94**	▲	**282,35**	**281,10**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,18	4,35	▲	44,41	45,39
Proporsi LPINP	1,97	2,01	▲	48,82	48,17
Proporsi LPINP Laki-laki	1,63	1,63	▲	45,15	45,08
Proporsi LPINP Perempuan	1,22	1,30	▲	55,11	53,26
Proporsi LPIP	0,67	0,65	▼	88,86	89,19
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,92**	**4,82**	▲	**16,40**	**50,25**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,61	0,99	▲	1,36	2,20
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	1,76	1,81	▲	2,93	3,01
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,55	2,03	▲	12,11	45,04
Produktivitas Tenaga Kerja	**3,37**	**3,66**	▲	**66,31**	**67,64**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,37	3,41	▲	67,00	67,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,26	▲	(0,69)	0,64
Hubungan Industrial	**4,18**	**3,97**	▼	**67,96**	**73,98**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,23	1,27	▲	41,03	42,40
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,45	0,22	▼	17,93	8,64
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,17	0,42	▲	8,33	21,17
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,33	2,06	▼	0,67	1,77
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,53**	**4,19**	▲	**50,49**	**64,05**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,48	1,23	▲	12,42	16,17
Tingkat Kecelakaan Kerja	1,54	1,07	▼	0,49	0,64
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,50	1,89	▲	37,59	47,24
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10,00**	**10,00**	–	**147,59**	**147,59**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	10,00	10,00	–	147,59	147,59
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	–	**75,67**	**75,79**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	53,19	52,87
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	–	22,48	22,92
Provinsi Jawa Barat	**56,77**	**60,52**	▲		

KEMNAKER

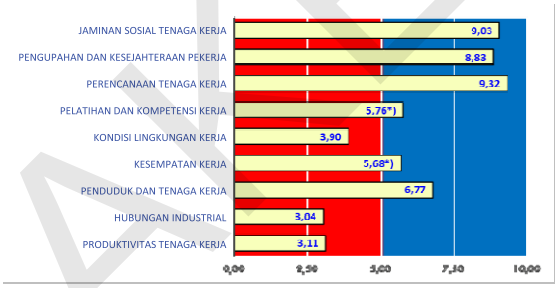
Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ke-16 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-3 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 9,32%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 61,17% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Jawa Tengah nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-11 menjadi peringkat ke-16. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah di urutan ke-4 dari 6 provinsi.

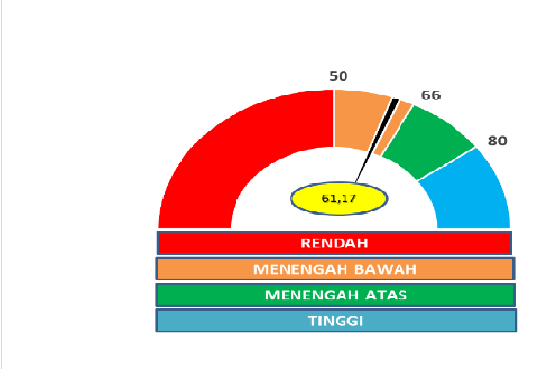


Grafik 39 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 40 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Grafik 41 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 21 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021

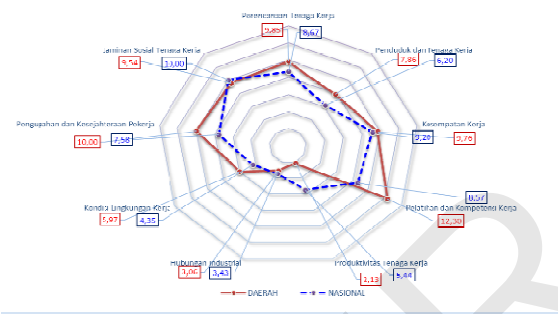
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,40**	**9,32**	▼	**94,00**	**93,21**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,40	9,32	▼	94,00	93,21
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,89**	**6,77**	▲	**46,76**	**35,76**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,86	1,06	▲	24,01	20,32
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,62	1,89	▲	7,67	2,26
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,13	2,26	▲	6,48	5,95
Persentase Setengah Pengangguran	1,28	1,55	▲	8,60	7,23
Kesempatan Kerja	**7,86**	**8,52**	▲	**286,89**	**283,81**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,96	3,36	▲	37,25	39,62
Proporsi LPINP	1,79	1,88	▲	52,14	50,57
Proporsi LPINP Laki-laki	1,45	1,50	▲	49,65	48,42
Proporsi LPINP Perempuan	1,21	1,30	▲	55,32	53,31
Proporsi LPIP	0,45	0,49	▲	92,52	91,89
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**8,86**	**8,64**	▼	**18,88**	**27,49**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,86	4,50	▲	6,36	12,03
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	3,73	▼	12,52	6,21
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	0,42	▲	-	9,25
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,41**	**3,11**	▲	**52,72**	**56,59**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,41	2,47	▲	55,00	55,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,64	▲	(2,28)	1,59
Hubungan Industrial	**3,15**	**3,04**	▼	**40,91**	**40,30**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,55	0,49	▼	18,39	16,35
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,07	0,06	▼	2,66	2,38
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,37	0,40	▲	18,51	19,93
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,16	2,09	▼	1,36	1,64
Kondisi Lingkungan Kerja	**4,37**	**3,90**	▼	**53,35**	**51,67**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	2,85	▼	46,75	24,25
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,15	0,00	▼	0,95	1,21
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,23	1,05	▲	5,64	26,21
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**9,07**	**8,83**	▼	**108,90**	**106,02**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	9,07	8,83	▼	108,90	106,02
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**8,58**	**9,03**	▲	**34,46**	**95,97**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	19,18	79,19
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	4,58	5,03	▲	15,28	16,78
Provinsi Jawa Tengah	**59,60**	**61,17**	▲		

KEMNAKER

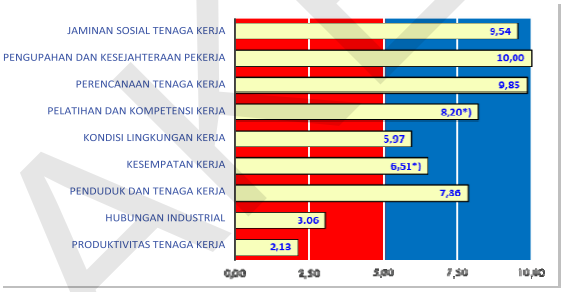
Provinsi DI Yogyakarta

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta berada di peringkat ke-4 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-2 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 70,47% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi DI Yogyakarta nilai indeksnya naik dan peringkatnya tetap di urutan ke-4. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta di urutan ke-2 dari 6 provinsi.

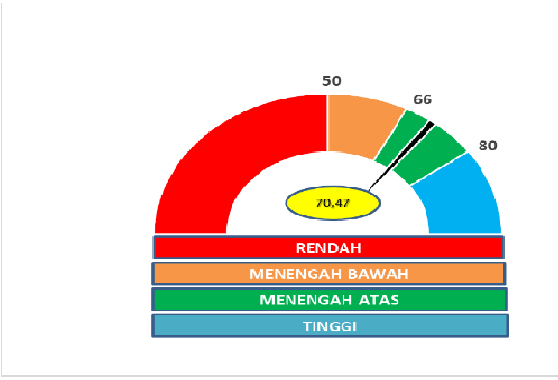


Grafik 42 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 43 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2021



Grafik 44 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2021

KEMNAKER

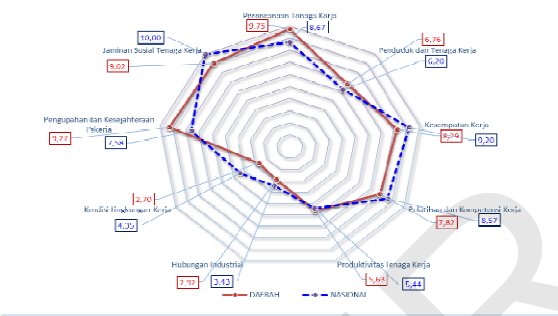
Tabel 22 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,70**	**9,85**	▲		**98,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,70	9,85	▲	97,00	98,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**7,08**	**7,86**	▲	**33,23**	**22,88**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,48	1,63	▲	12,71	9,89
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,60	1,90	▲	7,91	2,06
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,61	2,61	▲	4,57	4,56
Persentase Setengah Pengangguran	1,39	1,73	▲	8,04	6,37
Kesempatan Kerja	**9,24**	**9,76**	▲	**281,49**	**279,71**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,87	4,22	▲	42,59	44,64
Proporsi LPINP	2,01	2,09	▲	48,21	46,61
Proporsi LPINP Laki-laki	1,63	1,71	▲	45,03	43,27
Proporsi LPINP Perempuan	1,36	1,41	▲	51,85	50,58
Proporsi LPIP	0,37	0,32	▼	93,80	94,61
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**12,56**	**12,30**	▼	**146,18**	**187,78**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,50	4,50	–	66,83	78,07
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	6,00	–	33,64	69,63
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,06	1,80	▼	45,71	40,08
Produktivitas Tenaga Kerja	**1,83**	**2,13**	▲	**46,53**	**48,69**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,83	1,85	▲	47,00	48,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,28	▲	(0,47)	0,69
Hubungan Industrial	**4,24**	**3,06**	▼	**81,53**	**42,70**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,63	0,62	▼	20,85	20,81
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,21	0,20	▼	8,53	7,87
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	1,03	0,24	▼	51,62	12,00
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,37	1,99	▼	0,53	2,02
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,18**	**5,97**	▲	**38,04**	**60,17**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	2,14	▲	7,52	20,68
Tingkat Kecelakaan Kerja	1,97	2,26	▲	0,34	0,25
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,21	1,57	▲	30,18	39,24
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10,00**	**10,00**	–	**135,44**	**121,58**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	10,00	10,00	–	135,44	121,58
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,39**	**9,54**	▲	**94,11**	**98,27**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	76,16	79,79
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,39	5,54	▲	17,95	18,47
Provinsi DI Yogyakarta	**67,21**	**70,47**	▲		

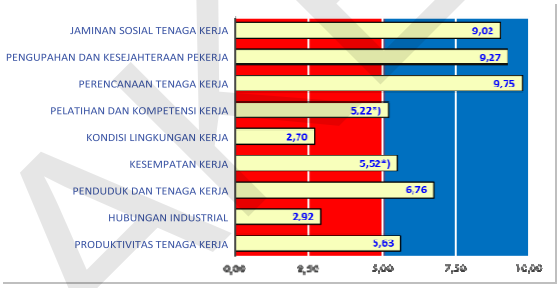
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur berada di peringkat ke-14 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-2 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 9,75%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Kondisi Lingkungan Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 62,15% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Jawa Timur nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-19 menjadi peringkat ke-14. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur di urutan ke-3 dari 6 provinsi.

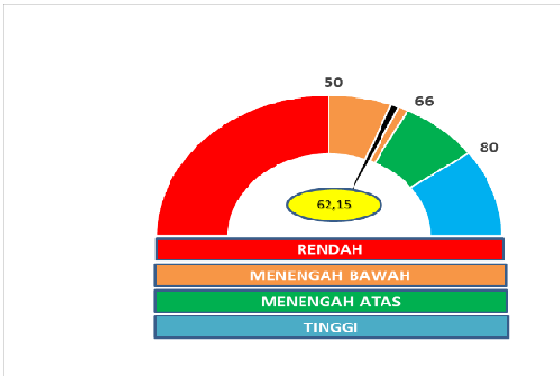


Grafik 45 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 46 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



Grafik 47 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 23 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021

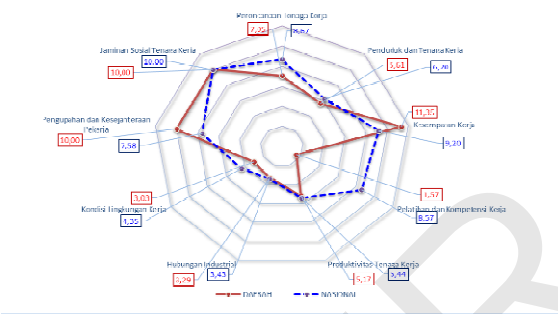
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,20**	**9,75**	▲	**92,00**	**97,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,20	9,75	▲	92,00	97,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,05**	**6,76**	▲	**45,13**	**35,99**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,95	1,04	▲	22,41	20,77
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,61	1,90	▲	7,89	2,01
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,29	2,31	▲	5,84	5,74
Persentase Setengah Pengangguran	1,20	1,51	▲	8,99	7,47
Kesempatan Kerja	**8,01**	**8,29**	▲	**280,62**	**279,09**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,80	2,98	▲	36,36	37,36
Proporsi LPINP	1,85	1,90	▲	51,10	50,16
Proporsi LPINP Laki-laki	1,60	1,63	▲	45,81	45,15
Proporsi LPINP Perempuan	1,09	1,15	▲	58,26	56,86
Proporsi LPIP	0,65	0,63	▼	89,10	89,55
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**3,22**	**7,82**	▲	**20,58**	**29,93**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,83	3,87	▲	1,85	8,59
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	1,67	3,24	▲	2,79	5,40
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,72	0,72	–	15,94	15,94
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,15**	**5,63**	▲	**72,18**	**82,21**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,15	4,35	▲	76,00	79,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,28	▲	(3,82)	3,21
Hubungan Industrial	**3,82**	**2,92**	▼	**51,04**	**21,17**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,97	0,34	▼	32,23	11,23
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,14	0,04	▼	5,60	1,46
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,26	0,16	▼	13,04	8,01
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,46	2,38	▼	0,18	0,47
Kondisi Lingkungan Kerja	**2,55**	**2,70**	▲	**27,87**	**23,53**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	–	9,91	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	1,84	1,77	▼	0,39	0,41
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,70	0,92	▲	17,58	23,12
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**9,92**	**9,27**	▼	**119,00**	**111,22**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	9,92	9,27	▼	119,00	111,22
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**8,44**	**9,02**	▲	**66,48**	**74,37**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	51,67	57,64
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	4,44	5,02	▲	14,81	16,72
Provinsi Jawa Timur	**55,35**	**62,15**	▲		

KEMNAKER

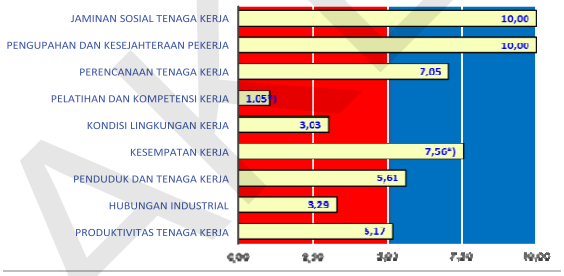
Provinsi Banten

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten berada di peringkat ke-24 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-12 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 57,07% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Banten pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Banten nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-21 menjadi peringkat ke-24. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten di urutan ke-6 dari 6 provinsi.

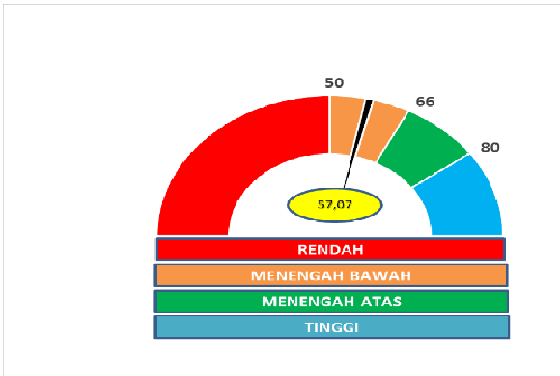


Grafik 48 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 49 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2021



Grafik 50 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 24 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2020-2021

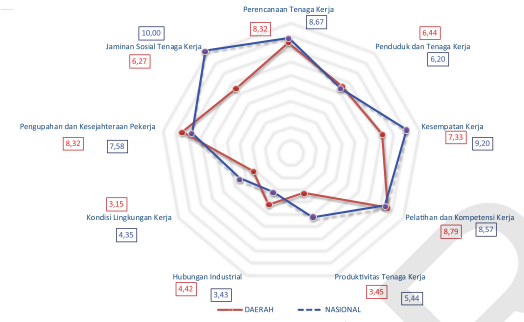
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**6,95**	**7,05**	▲	**69,50**	**70,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	6,95	7,05	▲	69,50	70,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,57**	**5,61**	▲	**53,50**	**44,40**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,68	0,73	▲	27,50	26,52
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,71	1,95	▲	5,83	1,07
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,09	1,50	▲	10,64	8,98
Persentase Setengah Pengangguran	1,09	1,43	▲	9,53	7,84
Kesempatan Kerja	**11,40**	**11,35**	▼	**274,23**	**276,37**
Persentase Tenaga Kerja Formal	5,28	5,34	▲	50,83	51,13
Proporsi LPINP	2,28	2,27	▼	43,17	43,36
Proporsi LPINP Laki-laki	1,83	1,82	▼	40,26	40,62
Proporsi LPINP Perempuan	1,50	1,51	▲	48,37	48,16
Proporsi LPIP	0,50	0,41	▼	91,60	93,10
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,27**	**1,57**	▼	**28,96**	**15,37**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,11	0,31	▲	0,24	0,69
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,94	0,64	▼	1,57	1,07
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,22	0,61	▼	27,15	13,60
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,36**	**5,17**	▲	**75,80**	**81,76**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,36	4,47	▲	79,00	80,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,71	▲	(3,20)	1,76
Hubungan Industrial	**2,40**	**3,29**	▲	**12,99**	**32,80**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,06	0,62	▲	1,92	20,54
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,22	0,19	▼	8,63	7,44
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,02	0,09	▲	0,86	4,42
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,11	2,40	▲	1,57	0,39
Kondisi Lingkungan Kerja	**0,90**	**3,03**	▲	**28,85**	**178,31**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,23	0,37	▲	11,15	11,83
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	▬	1,06	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,67	2,66	▲	16,64	66,48
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10,00**	**10,00**	▬	**136,28**	**138,70**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	10,00	10,00	▬	136,28	138,70
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**56,99**	**112,96**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	24,47	79,29
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	32,52	33,67
Provinsi Banten	**52,84**	**57,07**	▲		

KEMNAKER

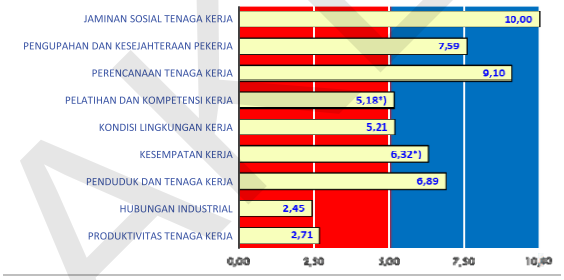
Provinsi Bali

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali berada di peringkat ke-15 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-5 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 61,21% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Bali nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-17 menjadi peringkat ke-15. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Bali Dan Nusa Tenggara, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali di urutan ke-1 dari 3 provinsi.

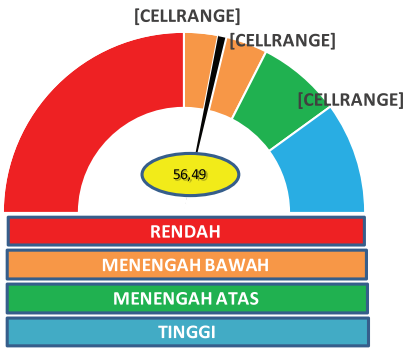


Grafik 51 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 52 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021



Grafik 53 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 25 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2020-2021

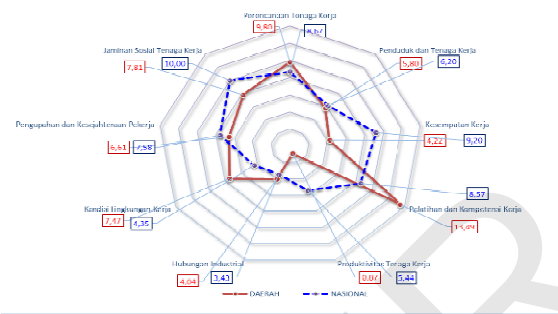
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,00**	**9,10**	▲	**90,00**	**91,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,00	9,10	▲	90,00	91,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,24**	**6,89**	▲	**43,81**	**32,12**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,36	1,38	▲	14,90	14,52
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,27	1,82	▲	14,66	3,70
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,34	2,41	▲	5,63	5,37
Persentase Setengah Pengangguran	1,28	1,29	▲	8,62	8,53
Kesempatan Kerja	**9,68**	**9,48**	▼	**275,62**	**277,75**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,00	3,93	▼	43,31	42,90
Proporsi LPINP	2,12	2,08	▼	46,20	46,82
Proporsi LPINP Laki-laki	1,88	1,87	▼	38,96	39,18
Proporsi LPINP Perempuan	1,25	1,22	▼	54,34	55,11
Proporsi LPIP	0,43	0,38	▼	92,82	93,73
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**4,63**	**7,77**	▲	**74,21**	**68,48**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,47	2,01	▲	1,05	4,47
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,93	3,11	▲	1,56	5,18
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	3,22	2,65	▼	71,60	58,82
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,87**	**2,71**	▼	**50,89**	**54,79**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,87	2,71	▼	60,00	58,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	▬	(9,11)	(3,21)
Hubungan Industrial	**2,67**	**2,45**	▼	**9,59**	**7,98**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,19	0,09	▼	6,40	3,06
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,01	0,01	▼	0,55	0,25
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,05	0,08	▲	2,33	3,76
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,42	2,27	▼	0,32	0,90
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,60**	**5,21**	▲	**21,35**	**68,15**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	5,81	6,78
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,98	2,75	▼	0,01	0,08
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,62	2,45	▲	15,54	61,29
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,76**	**7,59**	▼	**93,07**	**91,11**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,76	7,59	▼	93,07	91,11
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**55,86**	**138,12**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	33,02	116,16
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	22,84	21,96
Provinsi Bali	**56,45**	**61,21**	▲		

KEMNAKER

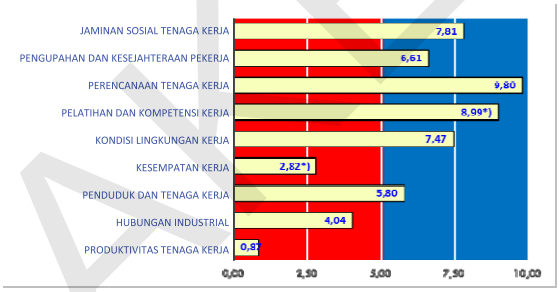
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di peringkat ke-19 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-5 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 9,80%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 60,12% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Nusa Tenggara Barat nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-15 menjadi peringkat ke-19. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Bali Dan Nusa Tenggara, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di urutan ke-2 dari 3 provinsi.

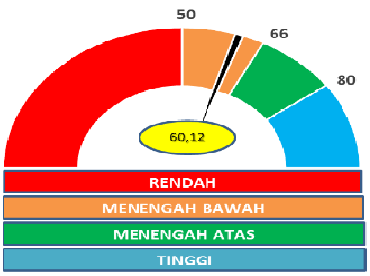


Grafik 54 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2021



) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10*

Grafik 55 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021



Grafik 56 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

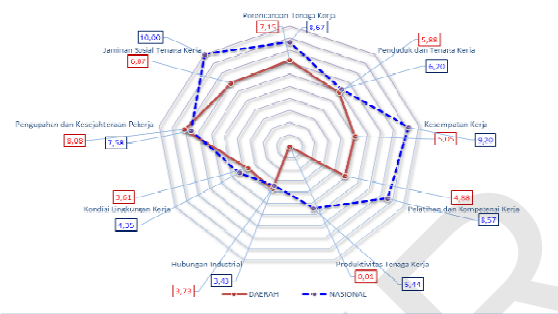
Tabel 26 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,95**	**9,80**	▲	**89,50**	**98,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,95	9,80	▲	89,50	98,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,79**	**5,80**	▲	**60,62**	**43,52**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,00	1,04	▲	21,48	20,78
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,10	1,76	▲	18,09	4,74
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,70	3,00	▲	4,22	3,01
Persentase Setengah Pengangguran	0,00	0,00	▲	16,83	15,00
Kesempatan Kerja	**4,54**	**4,22**	▼	**307,04**	**312,24**
Persentase Tenaga Kerja Formal	1,12	1,05	▼	26,53	26,11
Proporsi LPINP	1,35	1,22	▼	60,31	62,67
Proporsi LPINP Laki-laki	1,28	1,16	▼	53,65	56,57
Proporsi LPINP Perempuan	0,68	0,62	▼	68,30	69,80
Proporsi LPIP	0,11	0,17	▲	98,24	97,09
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**13,06**	**13,49**	▲	**94,54**	**97,32**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,50	4,50	–	12,05	16,64
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	6,00	–	25,66	14,31
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,56	2,99	▲	56,83	66,38
Produktivitas Tenaga Kerja	**0,90**	**0,87**	▼	**28,07**	**34,17**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,90	0,87	▼	36,00	35,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	–	(7,93)	(0,83)
Hubungan Industrial	**3,07**	**4,04**	▲	**48,17**	**65,63**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,54	0,93	▲	17,85	30,85
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,19	0,33	▲	7,66	13,24
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,41	0,42	▲	20,41	21,00
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,94	2,37	▲	2,26	0,54
Kondisi Lingkungan Kerja	**6,34**	**7,47**	▲	**34,06**	**67,38**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	3,00	4,00	▲	25,00	54,46
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,97	2,95	▼	0,01	0,02
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,36	0,52	▲	9,06	12,90
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,67**	**6,61**	▼	**80,06**	**79,38**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,67	6,61	▼	80,06	79,38
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,35**	**7,81**	▼	**42,09**	**38,88**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	24,26	26,16
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,35	3,81	▼	17,84	12,72
Provinsi Nusa Tenggara Barat	**57,66**	**60,12**	▲		

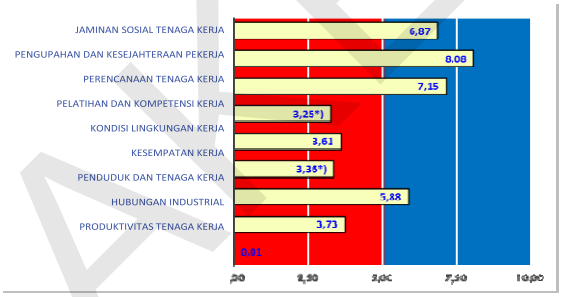
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di peringkat ke-31 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-9 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 4 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 5 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 8,08%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 45,24% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 dalam Status Rendah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-34 menjadi peringkat ke-31. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Bali Dan Nusa Tenggara, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di urutan ke-3 dari 3 provinsi.

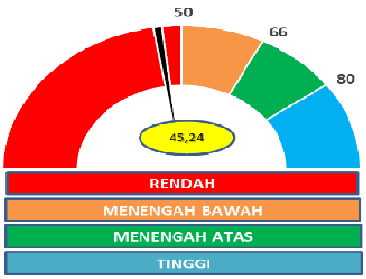


Grafik 57 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 58 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021



Grafik 59 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

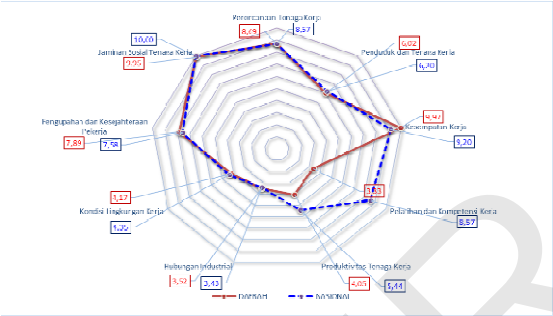
Tabel 27 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**7,20**	**7,15**	▼	**72,00**	**71,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	7,20	7,15	▼	72,00	71,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,90**	**5,88**	▲	**56,66**	**41,42**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,13	1,14	▲	19,17	18,97
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,09	1,78	▲	18,11	4,49
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,68	2,81	▲	4,28	3,77
Persentase Setengah Pengangguran	0,00	0,16	▲	15,10	14,19
Kesempatan Kerja	**5,14**	**5,05**	▼	**281,32**	**283,99**
Persentase Tenaga Kerja Formal	0,67	0,69	▲	23,90	24,03
Proporsi LPINP	1,76	1,70	▼	52,66	53,76
Proporsi LPINP Laki-laki	1,58	1,57	▼	46,36	46,70
Proporsi LPINP Perempuan	1,02	0,96	▼	60,17	61,65
Proporsi LPIP	0,11	0,13	▲	98,23	97,86
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**3,12**	**4,88**	▲	**51,13**	**72,89**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,41	1,49	▲	0,92	3,32
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,48	0,27	▼	0,81	0,45
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,22	3,11	▲	49,41	69,12
Produktivitas Tenaga Kerja	**0,02**	**0,01**	▼	**12,11**	**24,50**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,02	0,01	▼	25,00	25,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	–	(12,89)	(0,50)
Hubungan Industrial	**0,00**	**3,73**	▲	**1,00**	**58,44**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	0,78	▲	-	26,04
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,18	▲	-	7,15
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,49	▲	-	24,39
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	2,28	▲	1,00	0,87
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,10**	**3,61**	▲	**11,51**	**17,22**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,29	0,00	▼	11,45	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,81	2,92	▲	0,06	0,03
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,00	0,69	▲	0,00	17,20
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,25**	**8,08**	▼	**99,02**	**96,93**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,25	8,08	▼	99,02	96,93
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**6,78**	**6,87**	▲	**32,93**	**67,51**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	–	23,67	57,95
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	2,78	2,87	▲	9,26	9,56
Provinsi Nusa Tenggara Timur	**38,50**	**45,24**	▲		

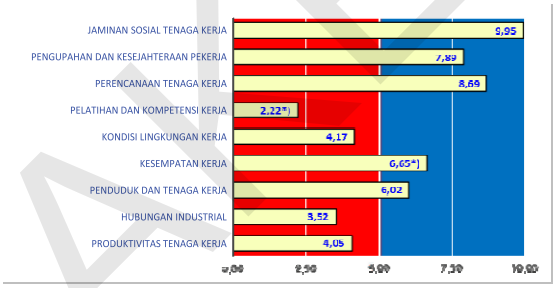
Provinsi Kalimantan Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat ke-22 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-11 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 9,95%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 57,59% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Barat nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-29 menjadi peringkat ke-22. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya mengalami peningkatan dari Rendah ke Menengah Bawah.
- Di regional Pulau Kalimantan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat di urutan ke-5 dari 5 provinsi.

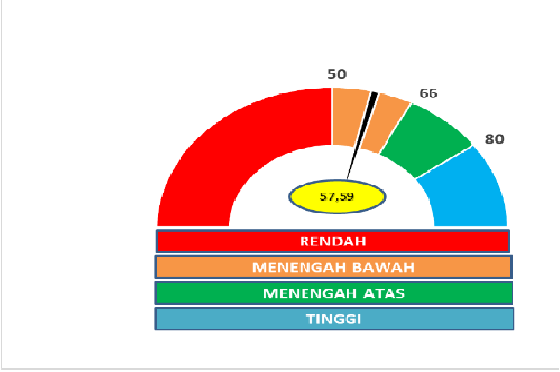


Grafik 60 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 61 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Grafik 62 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2021

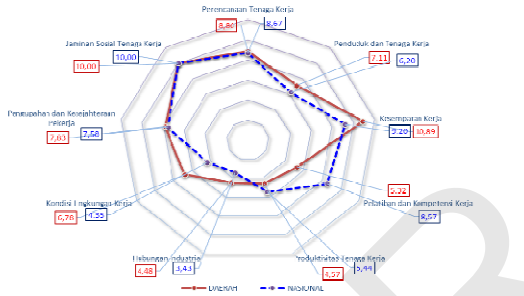
Tabel 28 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,85**	**8,69**	▼	**88,50**	**86,86**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,85	8,69	▼	88,50	86,86
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,49**	**6,02**	▲	**51,93**	**43,68**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,79	0,82	▲	25,43	24,74
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,49	1,83	▲	10,28	3,50
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,30	2,30	▼	5,81	5,82
Persentase Setengah Pengangguran	0,92	1,08	▲	10,42	9,62
Kesempatan Kerja	**9,41**	**9,97**	▲	**254,99**	**253,56**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,91	3,28	▲	36,99	39,13
Proporsi LPINP	2,24	2,26	▲	43,92	43,61
Proporsi LPINP Laki-laki	1,90	1,92	▲	38,64	38,14
Proporsi LPINP Perempuan	1,32	1,32	▲	52,77	52,62
Proporsi LPIP	1,04	1,20	▲	82,66	80,08
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**5,55**	**3,33**	▼	**95,36**	**20,30**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,39	0,75	▲	0,87	1,66
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,98	1,89	▲	1,63	3,15
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	4,18	0,70	▼	92,86	15,49
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,38**	**4,05**	▲	**48,61**	**59,76**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,38	2,55	▲	54,00	56,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,51	▲	(5,39)	3,76
Hubungan Industrial	**3,87**	**3,52**	▼	**60,40**	**60,55**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,05	1,00	▼	35,01	33,24
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,31	0,09	▼	12,44	3,77
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,24	0,43	▲	12,04	21,53
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,27	2,00	▼	0,91	2,01
Kondisi Lingkungan Kerja	**0,65**	**4,17**	▲	**117,32**	**62,67**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,69	▲	1,18	13,45
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	1,53	▲	100,00	0,49
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,65	1,95	▲	16,14	48,73
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,83**	**7,89**	▲	**93,97**	**94,73**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,83	7,89	▲	93,97	94,73
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**4,02**	**9,95**	▲	**30,65**	**109,60**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	30,60	89,78
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	0,02	5,95	▲	0,05	19,82
Provinsi Kalimantan Barat	**48,05**	**57,59**	▲		

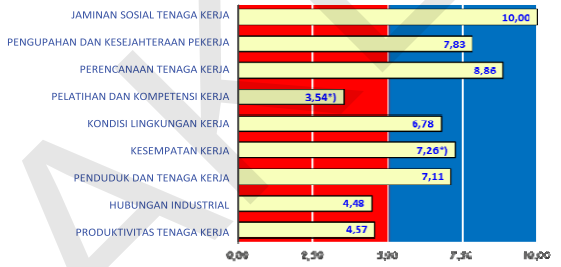
Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-7 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 65,84% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-8 menjadi peringkat ke-9. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Kalimantan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah di urutan ke-4 dari 5 provinsi.

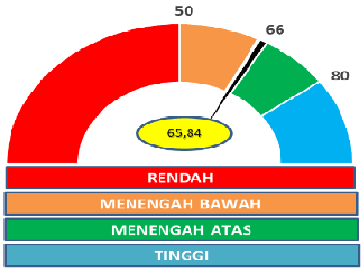


Grafik 63 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 64 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021



Grafik 65 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah Tahun 2021

Tabel 29 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

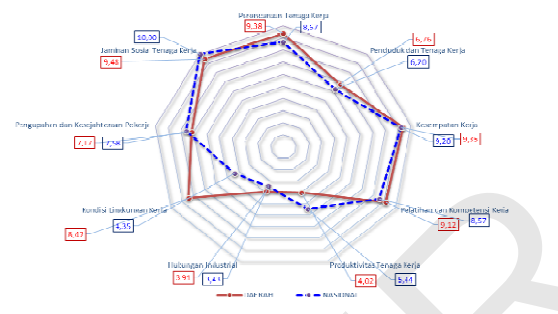
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,10**	**8,86**	▼	**91,00**	**88,57**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,10	8,86	▼	91,00	88,57
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,25**	**7,11**	▲	**48,78**	**37,98**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,83	0,87	▲	24,70	23,92
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,43	1,82	▲	11,46	3,52
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,60	2,62	▲	4,58	4,53
Persentase Setengah Pengangguran	1,39	1,80	▲	8,04	6,01
Kesempatan Kerja	**10,83**	**10,89**	▲	**257,29**	**257,06**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,15	4,20	▲	44,20	44,50
Proporsi LPINP	2,13	2,13	▲	45,97	45,91
Proporsi LPINP Laki-laki	1,83	1,83	▲	40,27	40,18
Proporsi LPINP Perempuan	1,22	1,23	▲	55,12	55,02
Proporsi LPIP	1,50	1,50	▬	71,72	71,44
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**10,23**	**5,32**	▼	**108,82**	**39,57**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	1,88	1,32	▼	4,17	2,93
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	2,54	▼	52,34	4,23
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,35	1,46	▼	52,31	32,41
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,01**	**4,57**	▲	**74,33**	**76,22**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,01	4,08	▲	75,00	75,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,49	▲	(0,67)	1,22
Hubungan Industrial	**3,01**	**4,48**	▲	**64,30**	**108,01**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,73	1,11	▲	24,47	36,93
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,10	0,33	▲	3,82	13,26
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,64	1,11	▲	32,16	55,52
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,54	1,93	▲	3,85	2,29
Kondisi Lingkungan Kerja	**1,29**	**6,78**	▲	**33,59**	**81,60**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	4,00	▲	-	42,94
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	1,26	▲	1,42	0,58
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,29	1,52	▲	32,17	38,08
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,39**	**7,83**	▲	**88,74**	**94,00**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,39	7,83	▲	88,74	94,00
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**108,03**	**114,73**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	84,51	78,44
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	23,52	36,30
Provinsi Kalimantan Tengah	**62,11**	**65,84**	▲		

KEMNAKER

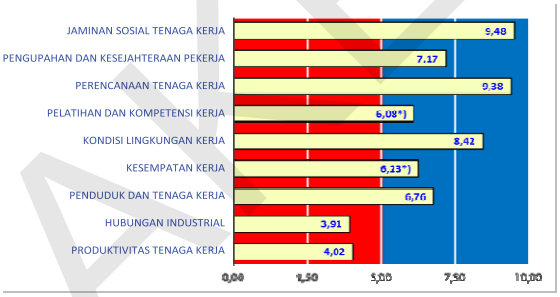
Provinsi Kalimantan Selatan

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-6 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-4 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 9,48%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 67,61% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Selatan nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-3 menjadi peringkat ke-6. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Kalimantan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan di urutan ke-3 dari 5 provinsi.

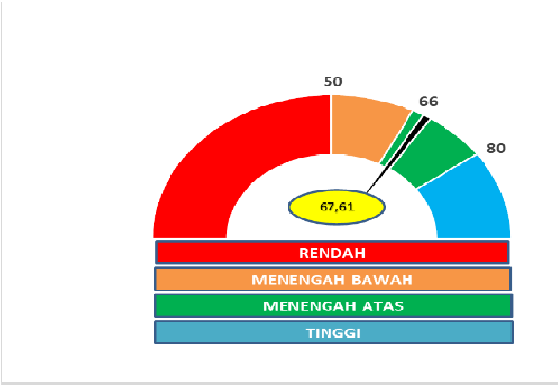


Grafik 66 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 67 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021



Grafik 68 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Tahun 2021

Tabel 30 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021

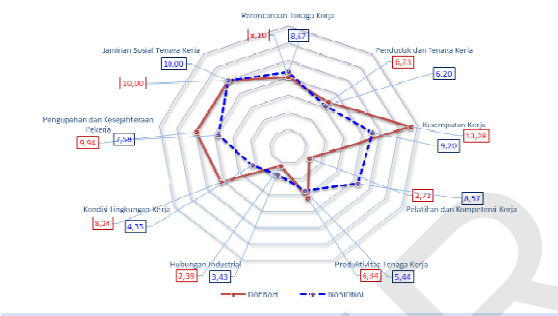
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,80**	**9,38**	▲	**88,00**	**93,75**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,80	9,38	▲	88,00	93,75
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,22**	**6,76**	▲	**45,12**	**36,73**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,02	1,05	▲	21,16	20,54
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,51	1,85	▲	9,83	2,95
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,57	2,51	▼	4,74	4,95
Persentase Setengah Pengangguran	1,12	1,34	▲	9,38	8,28
Kesempatan Kerja	**9,02**	**9,35**	▲	**273,15**	**271,37**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,29	3,49	▲	39,18	40,37
Proporsi LPINP	1,98	2,04	▲	48,79	47,55
Proporsi LPINP Laki-laki	1,75	1,82	▲	42,19	40,61
Proporsi LPINP Perempuan	1,10	1,13	▲	58,12	57,38
Proporsi LPIP	0,91	0,87	▼	84,87	85,46
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**11,92**	**9,12**	▼	**107,45**	**32,60**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	3,34	4,50	▲	7,42	10,12
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	4,41	3,91	▼	7,35	6,51
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	4,17	0,72	▼	92,68	15,96
Produktivitas Tenaga Kerja	**3,03**	**4,02**	▲	**58,43**	**66,20**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,03	3,14	▲	62,00	64,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,88	▲	(3,57)	2,20
Hubungan Industrial	**4,09**	**3,91**	▼	**67,41**	**68,83**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,90	0,90	▲	30,06	30,16
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,18	0,30	▲	7,14	11,85
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,60	0,51	▼	29,86	25,63
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,41	2,20	▼	0,35	1,20
Kondisi Lingkungan Kerja	**7,75**	**8,42**	▲	**269,23**	**113,96**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	4,00	▬	230,98	64,72
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,23	2,46	▲	0,26	0,18
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,52	1,96	▲	37,99	49,05
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,15**	**7,17**	▲	**85,84**	**85,98**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,15	7,17	▲	85,84	85,98
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,39**	**9,48**	▲	**114,72**	**98,94**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	96,77	80,68
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,39	5,48	▲	17,96	18,26
Provinsi Kalimantan Selatan	**67,36**	**67,61**	▲		

KEMNAKER

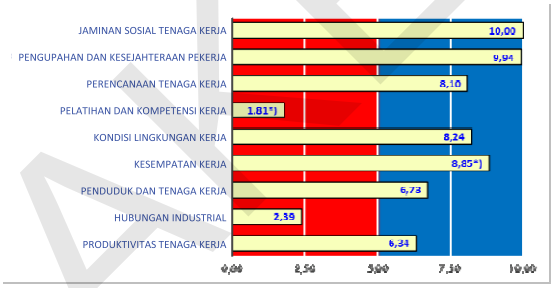
Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat ke-5 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-3 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 67,73% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Timur nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-5. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya mengalami peningkatan dari Menengah Bawah ke Menengah Atas.
- Di regional Pulau Kalimantan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur di urutan ke-2 dari 5 provinsi.

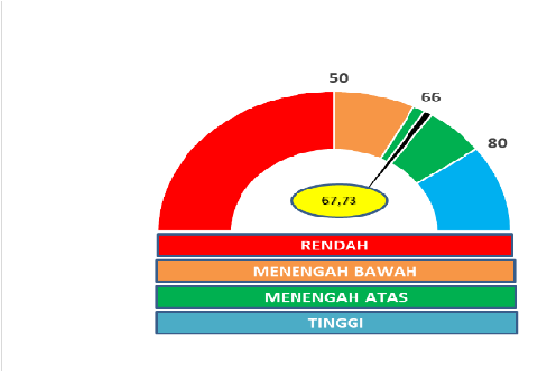


Grafik 69 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 70 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



Grafik 71 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Tahun 2021

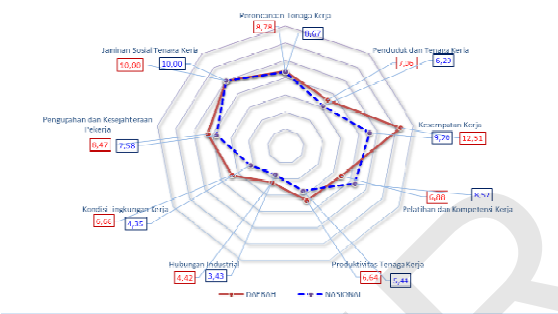
Tabel 31 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**7,45**	**8,10**	▲	**74,50**	**81,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	7,45	8,10	▲	74,50	81,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,13**	**6,73**	▲	**44,83**	**36,57**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,85	1,00	▲	24,25	21,56
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,67	1,89	▲	6,56	2,20
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,03	2,04	▲	6,87	6,83
Persentase Setengah Pengangguran	1,57	1,81	▲	7,14	5,97
Kesempatan Kerja	**13,02**	**13,28**	▲	**253,05**	**250,72**
Persentase Tenaga Kerja Formal	5,63	5,74	▲	52,86	53,51
Proporsi LPINP	2,49	2,54	▲	39,27	38,50
Proporsi LPINP Laki-laki	2,17	2,24	▲	31,84	30,16
Proporsi LPINP Perempuan	1,38	1,36	▼	51,39	51,70
Proporsi LPIP	1,34	1,39	▲	77,69	76,85
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**4,60**	**2,71**	▼	**37,56**	**14,51**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,88	0,39	▼	1,95	0,86
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	2,29	1,85	▼	3,82	3,08
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,43	0,48	▼	31,79	10,56
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,00**	**6,34**	▲	**276,19**	**281,84**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	–	279,00	281,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,34	▲	(2,81)	0,84
Hubungan Industrial	**4,17**	**2,39**	▼	**280,39**	**10,06**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,04	0,12	▲	1,42	4,15
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,01	▲	0,04	0,31
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	2,00	0,09	▼	277,42	4,30
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,12	2,18	▲	1,51	1,30
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,09**	**8,24**	▲	**2,63**	**109,60**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	4,00	▲	-	36,49
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,99	1,34	▼	0,00	0,55
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,11	2,90	▲	2,63	72,55
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**10,00**	**9,94**	▼	**122,10**	**119,24**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	10,00	9,94	▼	122,10	119,24
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**7,16**	**10,00**	▲	**52,76**	**169,11**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	1,16	4,00	▲	4,34	115,81
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	–	48,42	53,30
Provinsi Kalimantan Timur	**61,61**	**67,73**	▲		

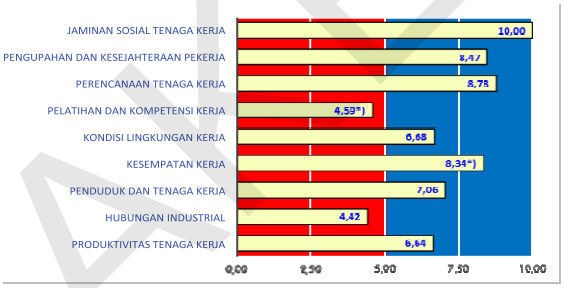
Provinsi Kalimantan Utara

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara berada di peringkat ke-2 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-1 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 71,44% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Utara nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-2. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Kalimantan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara di urutan ke-1 dari 5 provinsi.

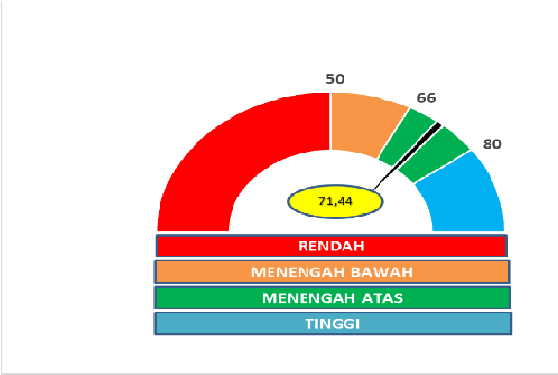


Grafik 72 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 73 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021



Grafik 74 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kalimantan Utara Tahun 2021

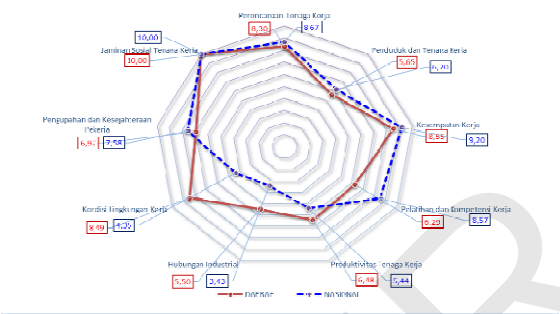
Tabel 32 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,88**	**8,78**	▼	**88,75**	**87,75**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,88	8,78	▼	88,75	87,75
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,24**	**7,06**	▲	**46,65**	**35,81**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,94	1,17	▲	22,59	18,41
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,46	1,72	▲	10,75	5,66
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,51	2,61	▲	4,97	4,58
Persentase Setengah Pengangguran	1,33	1,57	▲	8,33	7,16
Kesempatan Kerja	**12,51**	**12,51**	▲	**246,25**	**245,50**
Persentase Tenaga Kerja Formal	4,98	5,02	▲	49,07	49,26
Proporsi LPINP	2,50	2,61	▲	39,17	37,11
Proporsi LPINP Laki-laki	2,06	2,17	▲	34,63	32,06
Proporsi LPINP Perempuan	1,57	1,63	▲	46,61	45,21
Proporsi LPIP	1,39	1,09	▼	76,77	81,86
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**7,07**	**6,88**	▼	**12,46**	**21,68**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	1,22	0,69	▼	2,72	1,52
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	5,85	6,00	▲	9,74	15,81
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	0,20	▲	-	4,35
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,00**	**6,64**	▲	**178,78**	**187,61**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	▬	183,00	186,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,64	▲	(4,22)	1,61
Hubungan Industrial	**2,65**	**4,42**	▲	**41,46**	**92,11**
Tingkat PP Yang Disahkan	1,13	1,13	▲	37,54	37,70
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,40	▲	-	16,17
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,74	▲	-	36,84
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,52	2,15	▲	3,92	1,41
Kondisi Lingkungan Kerja	**4,70**	**6,68**	▲	**55,81**	**74,15**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	1,04	2,78	▲	15,22	23,91
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,04	1,90	▼	0,32	0,37
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,61	1,99	▲	40,27	49,87
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,59**	**8,47**	▼	**103,11**	**101,70**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,59	8,47	▼	103,11	101,70
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**116,51**	**138,36**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	89,92	110,30
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	26,59	28,06
Provinsi Kalimantan Utara	**66,63**	**71,44**	▲		

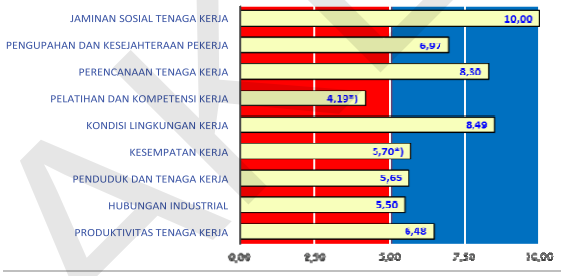
Provinsi Sulawesi Utara

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat ke-7 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-5 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 8 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 1 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 66,23% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 dalam Status Menengah Atas dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sulawesi Utara nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-7. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara di urutan ke-1 dari 6 provinsi.

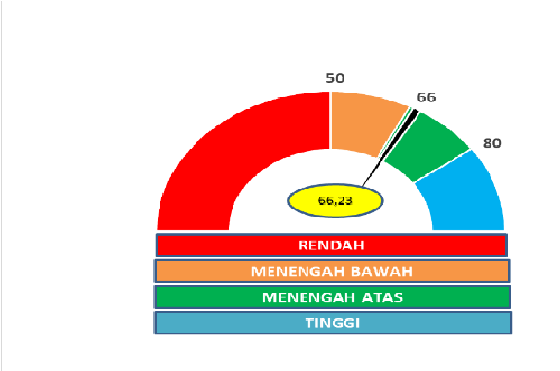


Grafik 75 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 76 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021



Grafik 77 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Tahun 2021

Tabel 33 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2021

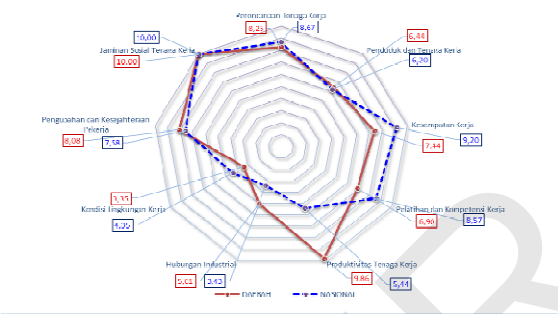
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,00**	**8,30**	▼	**90,00**	**83,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,00	8,30	▼	90,00	83,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,85**	**5,65**	▲	**56,23**	**48,27**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,54	0,57	▲	29,94	29,43
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,61	1,85	▲	7,87	2,98
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,91	1,99	▲	7,37	7,06
Persentase Setengah Pengangguran	0,79	1,24	▲	11,05	8,80
Kesempatan Kerja	**9,69**	**8,55**	▼	**224,91**	**282,67**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,35	3,31	▼	39,54	39,30
Proporsi LPINP	1,95	1,84	▼	49,30	51,32
Proporsi LPINP Laki-laki	1,53	1,44	▼	47,71	49,90
Proporsi LPINP Perempuan	1,37	1,29	▼	51,59	53,44
Proporsi LPIP	1,50	0,68	▼	36,77	88,70
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**7,64**	**6,29**	▼	**30,85**	**46,00**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	1,38	0,94	▼	3,06	2,09
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	5,42	3,65	▼	9,03	6,08
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,84	1,70	▲	18,75	37,84
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,21**	**6,48**	▲	**75,72**	**85,90**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,21	4,52	▲	77,00	81,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	1,96	▲	(1,28)	4,90
Hubungan Industrial	**4,80**	**5,50**	▲	**140,62**	**175,23**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,20	0,65	▲	6,78	21,54
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,16	0,51	▲	6,53	20,48
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	2,00	2,00	▬	127,07	132,59
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,44	2,34	▼	0,25	0,62
Kondisi Lingkungan Kerja	**10,00**	**8,49**	▼	**178,85**	**87,90**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	4,00	▬	64,25	44,56
Tingkat Kecelakaan Kerja	3,00	2,76	▼	0,00	0,08
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	3,00	1,73	▼	114,60	43,26
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,96**	**6,97**	▲	**83,48**	**83,62**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,96	6,97	▲	83,48	83,62
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**214,06**	**227,35**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	178,47	170,41
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	35,59	56,93
Provinsi Sulawesi Utara	**67,15**	**66,23**	▼		

KEMNAKER

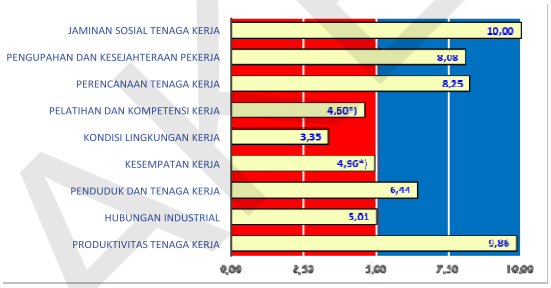
Provinsi Sulawesi Tengah

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat ke-10 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-3 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Kondisi Lingkungan Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 65,34% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sulawesi Tengah nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-31 menjadi peringkat ke-10. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya mengalami peningkatan dari Rendah ke Menengah Bawah.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah di urutan ke-2 dari 6 provinsi.

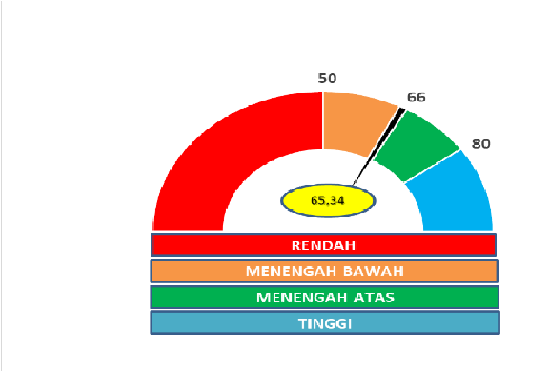


Grafik 78 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 79 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021



Grafik 80 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Tahun 2021

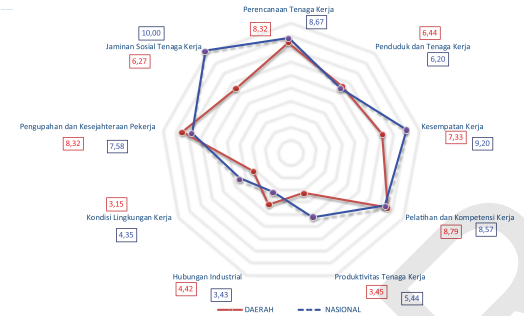
Tabel 34 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,20**	**8,25**	▲	**82,00**	**82,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,20	8,25	▲	82,00	82,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,91**	**6,44**	▲	**51,66**	**41,56**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,96	0,96	▼	22,23	22,31
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,24	1,74	▲	15,12	5,12
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,81	2,81	▲	3,77	3,75
Persentase Setengah Pengangguran	0,89	0,92	▲	10,53	10,38
Kesempatan Kerja	**7,59**	**7,44**	▼	**270,56**	**274,00**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,16	2,17	▲	32,63	32,68
Proporsi LPINP	2,02	1,97	▼	47,95	48,93
Proporsi LPINP Laki-laki	1,67	1,64	▼	44,20	44,99
Proporsi LPINP Perempuan	1,32	1,27	▼	52,78	53,93
Proporsi LPIP	0,42	0,39	▼	93,00	93,47
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**8,02**	**6,90**	▼	**16,12**	**27,14**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,02	4,50	▲	4,48	14,52
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	1,98	▼	11,64	3,30
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	0,42	▲	-	9,32
Produktivitas Tenaga Kerja	**0,00**	**9,86**	▲	**8,41**	**109,09**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	5,86	▲	8,85	98,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	4,00	▲	(0,44)	11,09
Hubungan Industrial	**0,00**	**5,01**	▲	**100,00**	**118,93**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	1,17	▲	-	39,14
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,36	▲	-	14,26
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	1,29	▲	-	64,31
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	2,20	▲	100,00	1,22
Kondisi Lingkungan Kerja	**2,83**	**3,35**	▲	**0,07**	**38,94**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	8,33
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,83	2,14	▼	0,06	0,29
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,00	1,21	▲	0,01	30,32
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**0,00**	**8,08**	▲	**-**	**97,02**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	0,00	8,08	▲	-	97,02
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,64**	**10,00**	▲	**93,85**	**97,64**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	75,06	76,25
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,64	6,00	▲	18,79	21,39
Provinsi Sulawesi Tengah	**42,18**	**65,34**	▲		

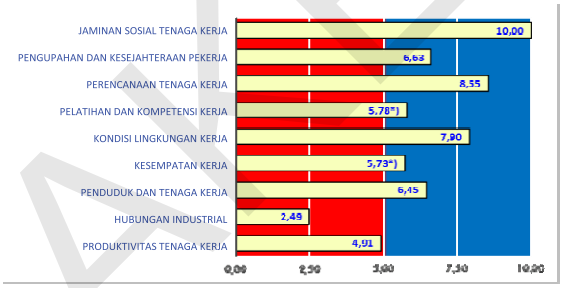
Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat ke-12 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-1 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan besar.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 64,20% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sulawesi Selatan nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-2 menjadi peringkat ke-12. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya mengalami penurunan dari Menengah Atas ke Menengah Bawah.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan di urutan ke-3 dari 6 provinsi.

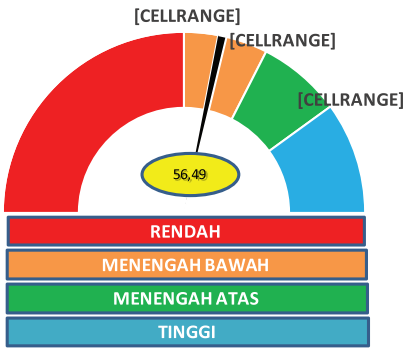


Grafik 81 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 82 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun



Grafik 83 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Tahun 2021

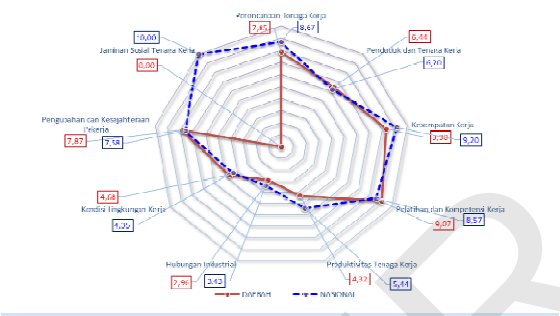
Tabel 35 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,65**	**8,55**	▼	**86,50**	**85,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,65	8,55	▼	86,50	85,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,20**	**6,45**	▲	**57,03**	**42,25**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,78	0,88	▲	25,48	23,78
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,24	1,73	▲	15,27	5,33
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,17	2,32	▲	6,31	5,72
Persentase Setengah Pengangguran	1,01	1,52	▲	9,96	7,42
Kesempatan Kerja	**8,45**	**8,60**	▲	**267,27**	**268,66**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,70	2,87	▲	35,78	36,76
Proporsi LPINP	2,12	2,11	▼	46,05	46,27
Proporsi LPINP Laki-laki	1,82	1,82	▼	40,48	40,63
Proporsi LPINP Perempuan	1,30	1,29	▼	53,24	53,38
Proporsi LPIP	0,50	0,50	▲	91,73	91,61
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**10,71**	**8,68**	▼	**39,26**	**43,31**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,46	2,65	▼	9,91	5,89
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	5,33	4,70	▼	8,89	7,83
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,92	1,33	▲	20,47	29,59
Produktivitas Tenaga Kerja	**4,55**	**4,91**	▲	**75,93**	**82,78**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,55	4,60	▲	81,00	82,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,31	▲	(5,07)	0,78
Hubungan Industrial	**3,24**	**2,49**	▼	**38,25**	**44,18**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,26	0,93	▲	8,60	31,00
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,07	0,10	▲	2,61	4,14
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,53	0,09	▼	26,58	4,50
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,38	1,36	▼	0,46	4,55
Kondisi Lingkungan Kerja	**9,86**	**7,90**	▼	**132,74**	**67,69**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	4,00	▬	36,85	39,52
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,86	2,78	▼	0,05	0,07
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	3,00	1,12	▼	95,84	28,09
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**6,80**	**6,63**	▼	**81,65**	**79,54**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	6,80	6,63	▼	81,65	79,54
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,92**	**10,00**	▲	**123,81**	**116,13**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	104,09	95,34
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,92	6,00	▲	19,73	20,79
Provinsi Sulawesi Selatan	**67,38**	**64,20**	▼		

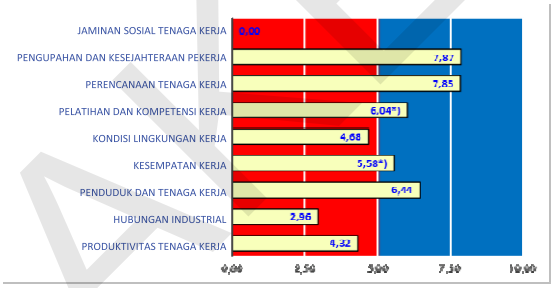
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di peringkat ke-30 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-7 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 7,87%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 51,57% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sulawesi Tenggara nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-18 menjadi peringkat ke-30. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara di urutan ke-6 dari 6 provinsi.

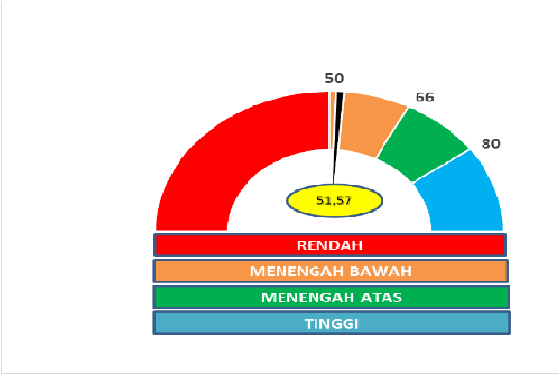


Grafik 84 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 85 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021



Grafik 86 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Tahun 2021

KEMNAKER

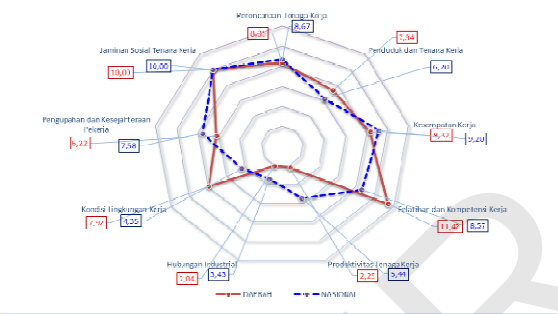
Tabel 36 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,90**	**7,85**	▼	**89,00**	**78,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,90	7,85	▼	89,00	78,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,48**	**6,44**	▲	**56,98**	**40,71**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,92	1,09	▲	23,00	19,87
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,05	1,68	▲	18,91	6,46
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,61	2,77	▲	4,58	3,92
Persentase Setengah Pengangguran	0,90	0,91	▲	10,49	10,45
Kesempatan Kerja	**8,02**	**8,38**	▲	**274,31**	**274,91**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,64	2,95	▲	35,41	37,19
Proporsi LPINP	2,04	2,05	▲	47,69	47,34
Proporsi LPINP Laki-laki	1,81	1,81	▲	40,76	40,65
Proporsi LPINP Perempuan	1,16	1,19	▲	56,71	55,98
Proporsi LPIP	0,38	0,37	▼	93,74	93,75
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**6,11**	**9,07**	▲	**44,87**	**105,80**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,00	1,18	▲	-	2,63
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	4,42	3,50	▼	7,37	5,84
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,69	4,38	▲	37,50	97,33
Produktivitas Tenaga Kerja	**3,80**	**4,32**	▲	**65,86**	**74,13**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,80	3,86	▲	72,00	73,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,45	▲	(6,14)	1,13
Hubungan Industrial	**3,59**	**2,96**	▼	**43,66**	**36,59**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,95	0,02	▼	31,59	0,64
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,29	0,05	▼	11,50	2,19
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,65	▲	-	32,68
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,36	2,23	▼	0,57	1,08
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,85**	**4,68**	▲	**27,77**	**162,16**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	3,25	▲	-	26,23
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,74	0,00	▼	0,09	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	1,11	1,44	▲	27,68	35,93
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**7,77**	**7,87**	▲	**93,22**	**94,45**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,77	7,87	▲	93,22	94,45
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**8,83**	**0,00**	▼	**82,08**	**0,00**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	0,00	▼	65,96	-
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	4,83	0,00	▼	16,11	0,00
Provinsi Sulawesi Tenggara	**56,35**	**51,57**	▼		

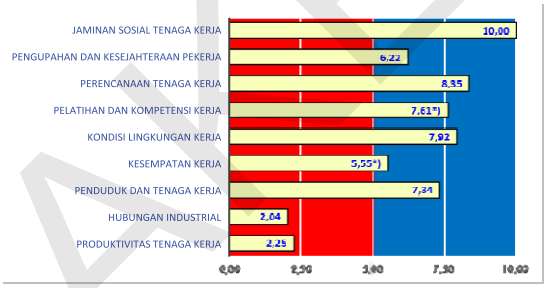
Provinsi Gorontalo

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo berada di peringkat ke-13 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-4 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 63,85% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Gorontalo nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-14 menjadi peringkat ke-13. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo di urutan ke-4 dari 6 provinsi.

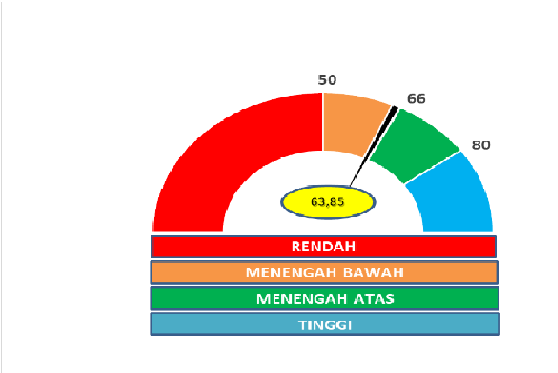


Grafik 87 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 88 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Grafik 89 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Gorontalo Tahun 2021

REVIEWER

Tabel 37 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

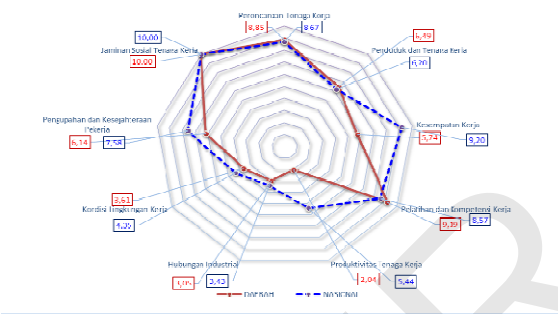
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,60**	**8,35**	▼	**96,00**	**83,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,60	8,35	▼	96,00	83,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**6,19**	**7,34**	▲	**52,13**	**39,16**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,68	0,77	▲	27,35	25,79
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,36	1,79	▲	12,82	4,28
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,68	3,00	▲	4,28	3,01
Persentase Setengah Pengangguran	1,46	1,78	▲	7,68	6,08
Kesempatan Kerja	**8,57**	**8,32**	▼	**275,53**	**279,07**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,07	3,02	▼	37,88	37,61
Proporsi LPINP	1,92	1,89	▼	49,71	50,32
Proporsi LPINP Laki-laki	1,46	1,42	▼	49,20	50,32
Proporsi LPINP Perempuan	1,42	1,42	▲	50,34	50,31
Proporsi LPIP	0,70	0,57	▼	88,39	90,50
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,81**	**11,42**	▲	**18,71**	**134,58**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,00	4,50	▲	-	26,58
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	2,13	6,00	▲	3,55	87,55
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,68	0,92	▲	15,15	20,45
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,29**	**2,25**	▼	**49,73**	**50,56**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,00	2,02	▲	49,00	50,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,29	0,22	▼	0,73	0,56
Hubungan Industrial	**2,97**	**2,04**	▼	**36,04**	**39,35**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,42	0,59	▲	14,14	19,72
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,11	0,13	▲	4,26	5,25
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,32	0,18	▼	16,12	8,93
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,12	1,14	▼	1,52	5,45
Kondisi Lingkungan Kerja	**9,67**	**7,92**	▼	**332,05**	**289,85**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	4,00	▬	260,00	260,00
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,79	2,73	▼	0,07	0,09
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	2,88	1,19	▼	71,98	29,76
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**5,97**	**6,22**	▲	**71,59**	**74,58**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	5,97	6,22	▲	71,59	74,58
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**10,00**	▬	**127,86**	**123,07**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	103,51	94,19
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	24,35	28,88
Provinsi Gorontalo	**58,07**	**63,85**	▲		

KEMNAKER

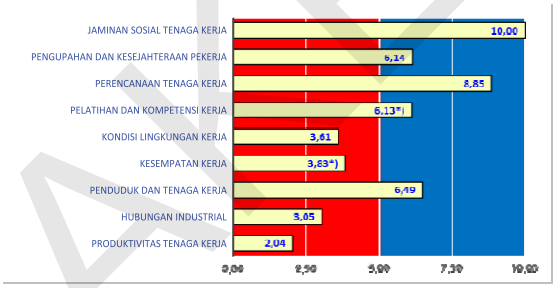
Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat ke-27 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-15 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 55,11% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Sulawesi Barat nilai indeksnya naik dan peringkatnya tetap di urutan ke-27. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Sulawesi, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat di urutan ke-5 dari 6 provinsi.

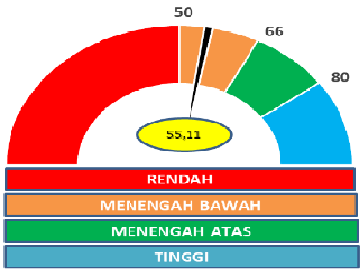


Grafik 90 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 91 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021



Grafik 92 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Tahun 2021

Tabel 38 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021

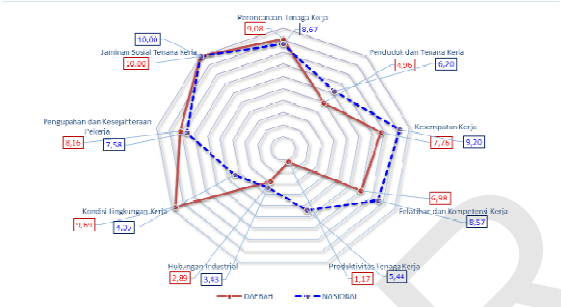
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**9,30**	**8,85**	▼	**93,00**	**88,50**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,30	8,85	▼	93,00	88,50
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,45**	**6,49**	▲	**58,02**	**42,13**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,86	0,93	▲	24,15	22,85
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,07	1,73	▲	18,57	5,50
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,92	2,97	▲	3,32	3,13
Persentase Setengah Pengangguran	0,60	0,87	▲	11,98	10,65
Kesempatan Kerja	**5,98**	**5,74**	▼	**281,60**	**285,41**
Persentase Tenaga Kerja Formal	1,26	1,23	▼	27,37	27,20
Proporsi LPINP	1,68	1,64	▼	54,20	54,91
Proporsi LPINP Laki-laki	1,52	1,47	▼	47,88	49,00
Proporsi LPINP Perempuan	0,97	0,96	▼	61,23	61,51
Proporsi LPIP	0,54	0,43	▼	90,92	92,79
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,82**	**9,19**	▲	**22,10**	**54,96**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,36	1,99	▲	0,80	4,41
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	1,62	5,33	▲	2,69	8,88
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,84	1,88	▲	18,60	41,67
Produktivitas Tenaga Kerja	**1,81**	**2,04**	▲	**40,03**	**47,53**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,81	1,83	▲	47,00	47,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,21	▲	(6,97)	0,53
Hubungan Industrial	**3,92**	**3,05**	▼	**66,09**	**33,85**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,35	0,72	▲	11,54	24,08
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,09	0,04	▼	3,75	1,55
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	1,01	0,14	▼	50,65	6,81
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,46	2,15	▼	0,15	1,41
Kondisi Lingkungan Kerja	**9,99**	**3,61**	▼	**152,64**	**21,37**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	0,00	▼	30,30	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,99	2,76	▼	0,00	0,08
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	3,00	0,85	▼	122,34	21,29
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**5,79**	**6,14**	▲	**69,44**	**73,64**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	5,79	6,14	▲	69,44	73,64
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**5,23**	**10,00**	▲	**17,42**	**115,79**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	4,00	▲	-	95,02
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,23	6,00	▲	17,42	20,77
Provinsi Sulawesi Barat	**50,28**	**55,11**	▲		

KEMNAKER

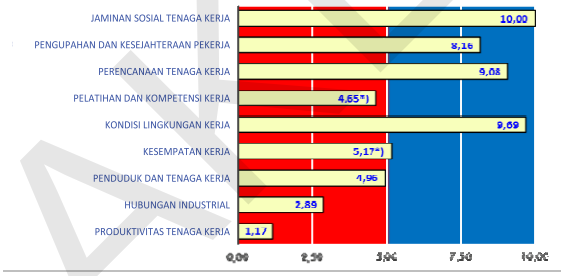
Provinsi Maluku

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku berada di peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-9 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 60,67% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Maluku pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Maluku nilai indeksnya naik dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-13 menjadi peringkat ke-17. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan
- Di regional Pulau Maluku Dan Papua, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku di urutan ke-1 dari 4 provinsi.

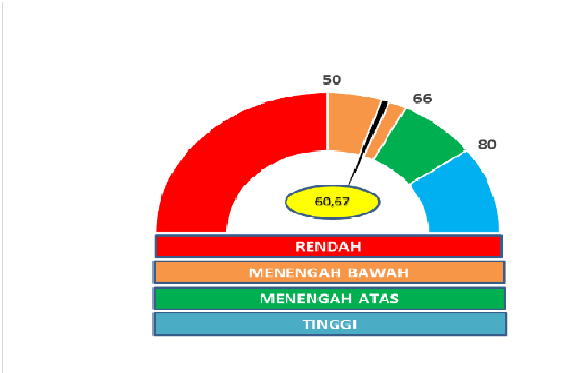


Grafik 93 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 94 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2021



Grafik 95 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2021

Tabel 39 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Tahun 2020-2021

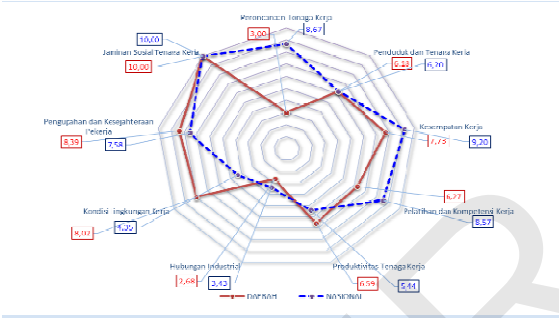
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,93**	**9,08**	▲	**89,25**	**90,75**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,93	9,08	▲	89,25	90,75
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,22**	**4,96**	▲	**58,82**	**50,81**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,68	0,61	▼	27,46	28,64
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,52	1,88	▲	9,59	2,49
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	1,86	2,02	▲	7,57	6,93
Persentase Setengah Pengangguran	0,16	0,45	▲	14,20	12,75
Kesempatan Kerja	**7,08**	**7,76**	▲	**285,08**	**280,64**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,30	2,67	▲	33,44	35,59
Proporsi LPINP	1,80	1,91	▲	52,08	49,97
Proporsi LPINP Laki-laki	1,45	1,57	▲	49,49	46,53
Proporsi LPINP Perempuan	1,21	1,25	▲	55,37	54,33
Proporsi LPIP	0,32	0,35	▲	94,70	94,22
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**9,48**	**6,98**	▼	**72,30**	**89,90**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,50	0,00	▼	11,14	-
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	2,41	3,17	▲	4,01	5,29
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,57	3,81	▲	57,14	84,62
Produktivitas Tenaga Kerja	**1,17**	**1,17**	▼	**30,43**	**38,82**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,17	1,17	▼	39,00	39,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	▬	(8,57)	(0,18)
Hubungan Industrial	**3,31**	**2,89**	▼	**39,25**	**33,86**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,27	0,15	▼	9,13	5,03
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,10	0,04	▼	4,17	1,53
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,51	0,52	▲	25,65	26,02
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,42	2,18	▼	0,31	1,28
Kondisi Lingkungan Kerja	**7,16**	**9,69**	▲	**82,58**	**134,81**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	1,73	4,00	▲	18,64	64,41
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,87	2,87	▲	0,04	0,04
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	2,56	2,81	▲	63,89	70,36
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,42**	**8,16**	▼	**101,10**	**97,86**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,42	8,16	▼	101,10	97,86
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**9,10**	**10,00**	▲	**209,72**	**192,66**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	192,72	171,68
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	5,10	6,00	▲	17,00	20,98
Provinsi Maluku	**58,87**	**60,67**	▲		

KEMNAKER

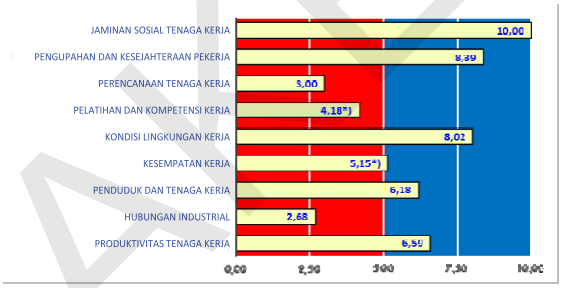
Provinsi Maluku Utara

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara berada di peringkat ke-21 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-10 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 58,86% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 dalam Status Menengah Bawah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Maluku Utara nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-24 menjadi peringkat ke-21. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Maluku Dan Papua, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara di urutan ke-2 dari 4 provinsi.

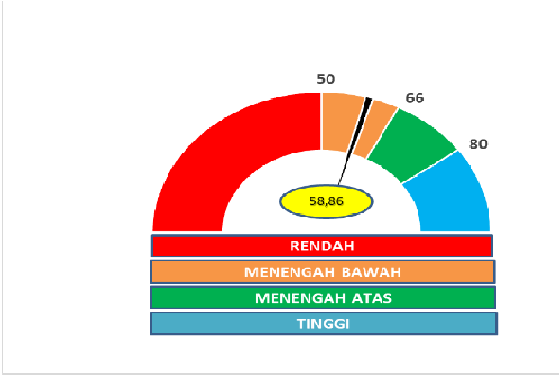


Grafik 96 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 97 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021



Grafik 98 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

KEMNAKER

Tabel 40 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

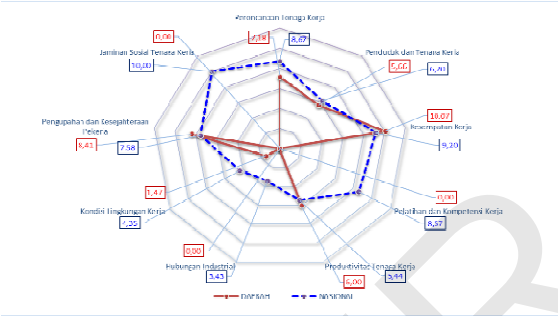
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**8,95**	**3,00**	▼	**89,50**	**30,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,95	3,00	▼	89,50	30,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,52**	**6,18**	▲	**52,84**	**44,18**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,73	0,67	▼	26,46	27,59
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,48	1,89	▲	10,45	2,12
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,46	2,57	▲	5,15	4,71
Persentase Setengah Pengangguran	0,84	1,05	▲	10,78	9,76
Kesempatan Kerja	**8,08**	**7,73**	▼	**265,19**	**285,31**
Persentase Tenaga Kerja Formal	2,38	2,82	▲	33,87	36,44
Proporsi LPINP	2,20	1,87	▼	44,66	50,80
Proporsi LPINP Laki-laki	1,82	1,50	▼	40,39	48,44
Proporsi LPINP Perempuan	1,38	1,23	▼	51,29	54,88
Proporsi LPIP	0,30	0,31	▲	94,98	94,76
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**4,69**	**6,27**	▲	**19,88**	**30,46**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,00	1,35	▲	-	2,99
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	4,10	3,98	▼	6,83	6,64
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,59	0,94	▲	13,04	20,83
Produktivitas Tenaga Kerja	**2,04**	**6,59**	▲	**49,21**	**70,08**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,04	2,59	▲	50,00	57,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	4,00	▲	(0,79)	13,08
Hubungan Industrial	**0,00**	**2,68**	▲	**100,00**	**14,70**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	0,32	▲	-	10,82
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,02	▲	-	0,61
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,05	▲	-	2,45
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	2,30	▲	100,00	0,82
Kondisi Lingkungan Kerja	**6,72**	**8,02**	▲	**73,81**	**113,28**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	4,00	▬	73,68	81,58
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,71	2,76	▲	0,10	0,08
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,00	1,26	▲	0,03	31,62
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,10**	**8,39**	▲	**97,14**	**100,63**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,10	8,39	▲	97,14	100,63
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**7,93**	**10,00**	▲	**78,92**	**89,09**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	65,83	63,86
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	3,93	6,00	▲	13,09	25,23
Provinsi Maluku Utara	**52,01**	**58,86**	▲		

KEMNAKER

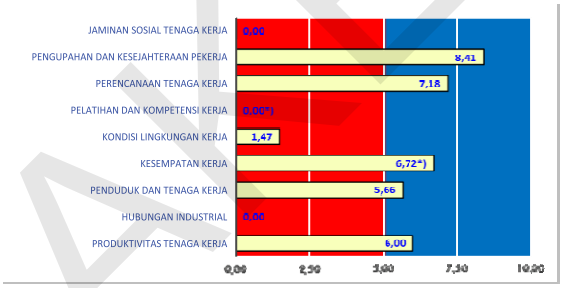
Provinsi Papua Barat

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat berada di peringkat ke-33 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-8 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 5 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 4 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 8,41%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 38,79% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 dalam Status Rendah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Papua Barat nilai indeksnya turun dan peringkatnya menurun dari peringkat ke-28 menjadi peringkat ke-33. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Maluku Dan Papua, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat di urutan ke-4 dari 4 provinsi.

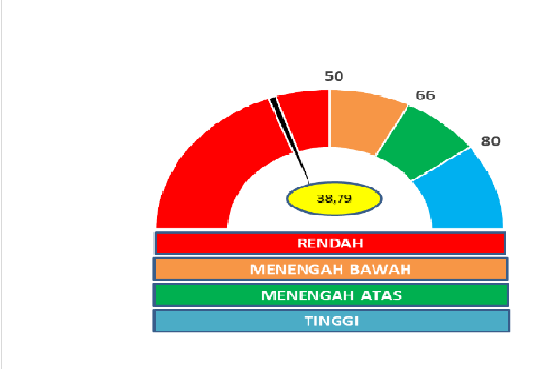


Grafik 99 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 100 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2021



Grafik 101 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Tabel 41 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2021

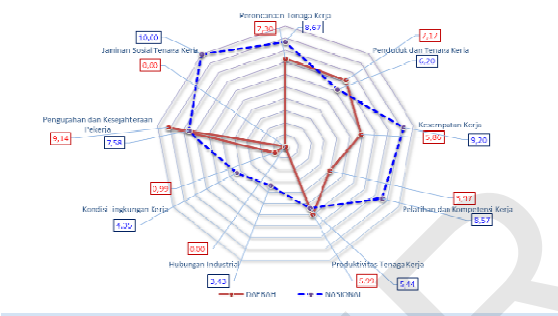
Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**7,28**	**7,18**	▼	**72,75**	**71,75**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	7,28	7,18	▼	72,75	71,75
Penduduk dan Tenaga Kerja	**4,70**	**5,66**	▲	**55,67**	**43,68**
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,86	0,97	▲	24,01	21,97
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,42	1,81	▲	11,69	3,81
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,05	2,29	▲	6,80	5,84
Persentase Setengah Pengangguran	0,36	0,59	▲	13,18	12,06
Kesempatan Kerja	**9,99**	**10,07**	▲	**263,22**	**261,45**
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,78	3,79	▲	42,02	42,08
Proporsi LPINP	2,36	2,40	▲	41,72	41,07
Proporsi LPINP Laki-laki	2,06	2,07	▲	34,65	34,50
Proporsi LPINP Perempuan	1,31	1,38	▲	52,93	51,19
Proporsi LPIP	0,49	0,44	▼	91,89	92,61
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**0,00**	**0,00**	–	**-**	**-**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	0,00	0,00	–	-	-
Produktivitas Tenaga Kerja	**6,00**	**6,00**	–	**127,62**	**120,48**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	6,00	–	134,00	126,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,00	–	(6,38)	(5,52)
Hubungan Industrial	**0,00**	**0,00**	–	**384,86**	**100,00**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	0,00	–	384,86	100,00
Kondisi Lingkungan Kerja	**3,15**	**1,47**	▼	**9,59**	**136,75**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	–	-	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,77	0,00	▼	0,08	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,38	1,47	▲	9,51	36,75
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**8,52**	**8,41**	▼	**102,19**	**100,91**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	8,52	8,41	▼	102,19	100,91
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**10,00**	**0,00**	▼	**125,88**	**0,00**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	0,00	▼	76,04	-
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	0,00	▼	49,84	0,00
Provinsi Papua Barat	**49,63**	**38,79**	▼		

KEMNAKER

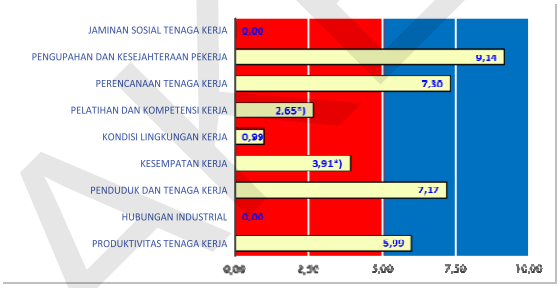
Provinsi Papua

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2021 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua berada di peringkat ke-32 dari 34 provinsi. Atau dari peringkat ke-16 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang.
- Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 4 diantaranya masuk kategori baik (>=5), sedangkan 5 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5).
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
- Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja sebesar 9,14%. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 40,43% kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Papua pada tahun 2021 dalam Status Rendah dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya.
- Pada tahun ini Provinsi Papua nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-33 menjadi peringkat ke-32. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya tidak mengalami perubahan.
- Di regional Pulau Maluku Dan Papua, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua di urutan ke-3 dari 4 provinsi.

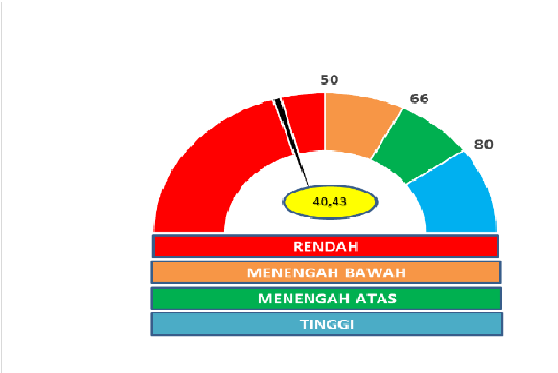


Grafik 102 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021



*) Dikonversi dari bobot 15 menjadi 10

Grafik 103 Capaian Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2021



Grafik 104 Status Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2021

Tabel 42 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2020-2021

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2020	2021	Grafik	2020	2021
Perencanaan Tenaga Kerja	**7,90**	**7,30**	▼	**79,00**	**73,00**
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	7,90	7,30	▼	79,00	73,00
Penduduk dan Tenaga Kerja	**5,74**	**7,17**	▲	**50,80**	**33,81**
Persentase NEET (15-24 tahun)	1,03	1,16	▲	20,92	18,51
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,28	1,84	▲	14,34	3,25
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,68	2,92	▲	4,28	3,33
Persentase Setengah Pengangguran	0,75	1,26	▲	11,26	8,72
Kesempatan Kerja	**5,82**	**5,86**	▲	**248,27**	**246,31**
Persentase Tenaga Kerja Formal	0,01	0,00	▼	20,08	19,53
Proporsi LPINP	2,38	2,39	▲	41,38	41,15
Proporsi LPINP Laki-laki	2,01	2,00	▼	35,95	36,05
Proporsi LPINP Perempuan	1,35	1,40	▲	51,88	50,72
Proporsi LPIP	0,06	0,07	▲	98,97	98,86
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	**2,84**	**3,97**	▲	**48,31**	**43,73**
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,74	0,19	▼	1,64	0,42
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	0,00	1,98	▲	-	3,30
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	2,10	1,80	▼	46,67	40,00
Produktivitas Tenaga Kerja	**7,45**	**5,99**	▼	**88,35**	**87,16**
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,51	4,72	▲	81,00	84,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	2,94	1,26	▼	7,35	3,16
Hubungan Industrial	**0,00**	**0,00**	▬	**700,00**	**100,06**
Tingkat PP Yang Disahkan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,00	0,00	▬	700,00	100,06
Kondisi Lingkungan Kerja	**0,00**	**0,99**	▲	**54,02**	**124,80**
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	▬	54,00	100,00
Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,00	0,99	▲	0,02	24,80
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	**9,12**	**9,14**	▲	**109,39**	**109,71**
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	9,12	9,14	▲	109,39	109,71
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**0,00**	**0,00**	▬	**0,00**	**0,00**
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	▬	-	-
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	0,00	0,00	▬	0,00	0,00
Provinsi Papua	**38,86**	**40,43**	▲		

KEMNAKER



BAB 5
PENUTUP

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional sebesar 2,12 poin, yakni dari 61,33 pada 2020 menjadi 63,45 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2020-2021. Kondisi perekonomian yang mulai membaik seiring dengan menurunnya status PPKM sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan ketenagakerjaan, sehingga nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan juga ikut meningkat.

Merujuk hasil IPK tahun 2021, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan antara lain melalui:

1. Penguatan perencanaan ketenagakerjaan, yang melibatkan *stakeholder* terkait di daerah termasuk kalangan akademisi. Perencanaan ketenagakerjaan ini harus dapat mengantisipasi *platform* baru yang ditandai dengan munculnya *demand* untuk jabatan-jabatan baru yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga banyak *demand* yang hilang karena tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Penguatan aspek legal dokumen perencanaan ketenagakerjaan di daerah melalui Peraturan Kepala Daerah seyogianya dilakukan agar dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan acuan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan di wilayahnya;
2. Pemanfaatan data ketenagakerjaan umum yang bersumber dari Badan Pusat Statistik oleh Pemerintah Daerah sebagai database penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan di daerah;
3. Penguatan lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk lebih meningkatkan kapasitas dan daya tampung pelatihan bagi para pencari kerja serta mendorong peningkatan jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi.
4. Penguatan kelembagaan hubungan industrial untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta mendorong pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan untuk lebih melindungi hak-hak pekerja.
5. Penguatan peran aktif pengawas ketenagakerjaan dalam meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan wajib lapor serta mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menekan angka kecelakaan kerja di tempat kerja;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEMNAKER



TIM PENGUKUR

1. Widyantoro Mukti Raharjo, S.Sos, MM
2. Ardencius Gultom, S.Pd
3. Hikmat Ghazaly, S.Si., M.Si.
4. Edi Gunadi, S.E., M.Si.
5. Dicky Febriansyah Perangin-angin, S.Kom.
6. Yosef Zamzam, SE
7. Noor Andrini Wuryandari
8. Ristiyan Widiaswati, S.I.P.
9. Naomi Ratna Sari S.Si.
10. Sri Ning Sulastri, S.E., M.M.
11. Rini Nurhayati, SE, MT
12. Endang Asriyati, S.Si., M.Si.
13. Desy Riandini, S.Si.
14. Karisma Ayu Rahmawati, S.Kom.
15. Lussi Herfiana Aprianti, SE.
16. Denofrizal Dityasyahril,S.E.
17. Faizah
18. Lukman Shobirin, A.Md
19. Alfian Effendi, S.Kom.
20. Fadila Ismira, S.T.
21. Rahmad Saleh, S.Kom.
22. Nurlita Muji Rahayu, S.E.
23. Mareta Puspitasari, S.Kom.
24. Subandi
25. Zega Prasetyo Yogo, S.E.
26. Henriko Tobing, SE, ME
27. Hadhi Raharja, S.IP.
28. Faizal Amir P. Nasution, S.Kom., M.BA
29. Benediktus Heru Dwiwangga, S.Kom.
30. Erna Erawati, S.Hut
31. Ir. Helaria Puspita Chandra
32. Ervin Jongguran Marajohan, S.E., M.Si., Ak.
33. Effy Woeri Priljantari, S.Psi, MM
34. Rahmawati, S.Psi, MM
35. Ariyo Wibisono, S.Kom.
36. Primadita
37. Reski Mulan Ambardi, S.T.

KEMNAKER



TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Ir. Ismail Pakaya, ME
Penanggungjawab	:	Siti Kustiati, S.E., M.Si.
Koordinator	:	Widyantoro Mukti Raharjo, S.Sos, MM
Editor	:	Ardencius Gultom, S.Pd
Penulis	:	Hikmat Ghazaly, S.Si., M.Si.
		Edi Gunadi, S.E., M.Si.
Pengolah Data	:	Dicky Febriansah Perangin-angin, S.Kom
		Yosef Zamzam, S.E.

KEMNAKER



KEMNAKER

KEMNAKER

Diterbitkan oleh :

PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5270944

Fax : 021-5274923

Website : http://pusatptk.naker.go.id

ISBN 978-602-7536-46-3

9 786027 536463